

**Peranan Pemerintah Daerah dalam PemberdayaanUKM di Desa  
Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten  
PringsewuPerspektif Ekonomi Islam**

(Studi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kain Perca desa Sukamulya  
Binaan Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu)



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis

Oleh :

**DINDA TAURESIA FEBRINA**

**NPM : 1351010025**

**Program Studi : Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1438H / 2017**

**Peranan Pemerintah Daerah dalam PemberdayaanUKM di Desa  
Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten  
PringsewuPerspektif Ekonomi Islam**

(Studi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kain Perca desa Sukamulya  
Binaan Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis

Oleh :

**DINDA TAURESIA FEBRINA**

**NPM : 1351010025**

**Program Studi : Ekonomi Syari'ah**

Pembimbing I : Drs. Nasruddin M. Ag

Pembimbing II : M. Kurniawan, S.E., M.E. Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1438H / 2017**

## ABSTRAK

Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Dengan adanya perhatian pemerintah ditunjukkan dengan cara memberikan berbagai kemudahan untuk terlaksananya usaha kecil, dari mulai memberikan keringanan pajak, kemudahan mendapatkan izin usaha, serta memberikan pengarahan dan pembinaan bagi para pelaku usaha kecil. Dengan adanya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Pringsewu sebagai motivator dalam pemberdayaan UKM akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Rumusan masalah adalah (1) bagaimanakah peranan pemerintah daerah dalam memberdayakan pengrajin kain perca di desa sukamulya kecamatan banyumas kabupaten pringsewu dan (2) apakah peranan pemerintah daerah terhadap pemberdayaan pengrajin kain perca di desa sukamulya kecamatan banyumas kabupaten pringsewu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui dan menganalisis peranan pemerintah daerah terhadap pemberdayaan pengrajin kain perca di desa sukamulya kecamatan banyumas kabupaten pringsewu? dan (2) Mengetahui dan menganalisis Pandangan Ekonomi Islam terhadap Peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan pengrajin kain perca di desa Sukamulya kecamatan Banyumas kabupaten Pringsewu.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah empat puluh satu orang yang terdiri dari tiga belas pemilik usaha, dua puluh enam tenaga kerja (penjahit) dan dua orang dari Dinas Koperindag. Data yang digunakan adalah data primer dan skunder yang diperoleh dari hasil observasi dan dari arsip Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintah (Dinas Koperindag) telah melakukan kegiatan pemberdayaan UKM di desa Sukamulya dengan beberapa tahap yaitu, peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, pemberian bantuan, pemasaran (promosi) dan pinjaman modal, kegiatan tersebut berjalan baik, namun yang terjadi dilapangan Dinas Koperindag sangat kurang dalam pengawasan sehingga menimbulkan adanya benih masalah antar kelompok usaha. Perspektif ekonomi islam dalam pelaksanaan pemberdayaan ini adalah adanya ketidakadilan dalam pendistribusian bantuan, karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu keadilan distribusi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberdayaan UKM kain perca di Desa Sukamulya ini

sudah cukup baik hanya saja pengawasan pemerintah dalam pendistribusian bantuan sangat kurang, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial antar anggota kelompok, hal tersebut sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721)703289*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PEMBERDAYAAN UKM DIDESA SUKAMULYA  
KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN  
PRINGSEWU PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(STUDI PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA  
(KUBE) KAIN PERCA DESA SUKAMULYA BINAAN  
DINAS KOPERINDAG KABUPATEN PRINGSEWU)**

Nama Mahasiswa : **DINDA TAURESIA FEBRINA**  
NPM : 1351010025  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

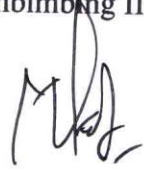
**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

  
**Drs. H. Nasruddin M. Ag.**  
**NIP. 195809241990031003**

Bandar Lampung, 09 Agustus 2017  
Pembimbing II

  
**M. Kurniawan, S.E., M.E.Sy.**  
**NIP. 198605172015031005**

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah

  
**Madnasir, S.E., M.S.I.**  
**NIP. 197504242002121**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN UKM DI DESA SUKAMULYA KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (Kube) Kain Perca Desa Sukamulya Binaan Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu)** disusun oleh, **DINDA TAURESIA FEBRINA**, NPM: **1351010025**, jurusan **Ekonomi Syari'ah**, telah di ujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Senin, 16 Oktober 2017**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Asriani, S.H., MH.**

(.....)

**Sekretaris : Ghina Ulfah, M.E.Sy.**

(.....)

**Penguji I : Any Eliza, M.Ak.**

(.....)

**Penguji II : Drs. H. Nasruddin, M. Ag.**

(.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Dr. Moh. Bahrudin, M.A.  
NIP. 195808241989031003**



## MOTTO

عِظْكُمْ وَأَلْبِغِي وَالْمُنْكَرَ الْفَحْشَاءَ عَنْ وَيَنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِيتَايَ وَالْإِحْسَنَ بِالْعَدْلِ يَا مُرُ اللَّهَ إِنَّ  
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat

kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

( QS. An- Nahl : 90)

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Komaruddin dan Ibu Rusda. Yang saya hormati dan saya banggakan. Selalu menguatkan dan sepenuh jiwa raga, merawat, dan memotivasi saya dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, serta mendoakan saya agar selalu ada dalam jalan-Nya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan berkah dalam setiap langkahnya.
2. Kakak dan adik saya, Annisa Pramudia dan Nindiya Meta Claudina yang senantiasa selalu memberikan semangat dan mendoakan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Almamaterku tercinta tempat saya menimba ilmu yaitu UIN Raden Intan Lampung. Semoga selalu jaya, maju dan berkualitas.
4. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Islam angkatan 2013 yang tak henti-hentinya memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama nama lengkap Dinda Tauresia Febrina, dilahirkan di desa Sinar Waya, Pada tanggal 15 Februari 1995. Penulis merupakan anak keduadari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Komaruddin dan Ibu Rusda.

Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu

1. MIN Model Bandung Barupada Tahun 2001- 2007,
2. SMP Muhammadiyah 01 Pringsewu pada tahun 2007 – 2010
3. SMA N 1 Gadingrejo yang diselesaikan pada tahun 2010 - 2013.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Ekonomi Syariah, di Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui seleksi Berkas Masuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (SBMPTAIN) pada Tahun 2013.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UKM di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kain Perca desa Sukamulya Binaan Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh penyelesaian skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Madnasir, S.E., M.Si selaku ketua jurusan dan Deki Fermansyah S.E., M.Si selaku sekretaris jurusan Ekonomi Islam yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi kepada mahasiswa.

3. Drs. Nasruddin M. Agselakupembimbing I dan M. Kurniawan, S.E., M.E. Sy yang telah meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan penulishingga penulis anskripsi ini selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang bermanfaat kepada penulishingga dapat menyelesaikan studi.
5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut, serta perpustakaan daerah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
6. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu yang telah membantupenulis dalam mendapatkan data-data penelitian serta memberikan penjelasan mengenai data-data tersebut.
7. Kelompok Usaha Bersama Kain Perca di desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data penelitian serta penjelasan mengenai usaha kain perca tersebut.
8. Sahabat seperjuangankhususnya kelas E, Jurusan Ekonomi Syariah, angkatan 2013 yang selalu bersamamelama proses perkuliahan serta memberikandukungan, semangat, dan bantuandalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat terbaik yang telah membantudan memberisemangat kepada penulis, yaitu Nurul Maya,

Umi Sofiatun, Eliyana, Umi Mursidah, Yunda (Ike), Adiks (Kiki), Uni (Selma), danlainnyaterimakasihatasdo'adandukungannyaselamaini.

10. Serta calon Imam ku yang telah banyak mendukungku memotivasiku selama mengerjakan skripsi ini yaitu Muhammad Kapitan terima kasih atas do'a dan dukungannya selama ini.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan hal tersebut dikarekanan adanya keterbatasan waktu, dana, kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Khususnya ilmu-ilmu ke Islaman di abad modern.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2017

Penulis,

**Dinda Tauresia Febrina**

**NPM. 1351010025**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. PenegasanJudul.....	1

B. Alasan Memilih Judul .....	4
C. Latar Belakang Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	14
E. Tujuan Penelitian .....	15
F. Metode Penelitian .....	15

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Peran Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat	
1. Sejarah berdirinya Dinas Koperindag .....	22
2. Peranan Fungsi Dinas Koperindag .....	24
B. UKM	
1. Pengertian Usaha Kecil Menengah .....	27
2. Jenis – jenis Industri Kecil Menengah .....	33
3. Keunggulan dan Kelemahan UKM .....	34
4. Perkembangan UKM di Indonesia dan dilampung .....	36
C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat .....	42
2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui UKM .....	46
D. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Ekonomi Islam	
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Ekonomi Islam .....	49
2. Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi Islam .....	52
3. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Ekonomi Islam .....	54

### **BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu**

1. Sejarah berdirinya Dinas Koperindag ..... 62
2. Visi dan Misi Dinas Koperindag ..... 66
3. Keadaan sosial ekonomi Pekon Sukamulya ..... 67
4. Kondisi geografis Desa Sukamulya ..... 68
5. Keadaan penduduk Pekon Sukamulya ..... 73

#### **B. Program Dinas Koperindag dan Implementasi Pemberdayaan UKM kain**

Perca di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu. .... 75

### **BAB VI ANALISIS DATA**

1. Peranan Dinas Koperindag terhadap Pemberdayaan UKM di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu. .... 82
2. Peranan Dinas Koperindag dalam Pemberdayaan UKM Perspektif Ekonomi Islam ..... 93

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 99
- B. Saran ..... 100

### **DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pemilik Usaha.....	12
Tabel 1.2	Luas Penggunaan Lahan di Pekon Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu 2015.....	71
Tabel 1.3	Distribusi Jumlah Penduduk Pekon Sukamulya Berdasarkan Jenis Kelamin. ....	73
Tabel 1.4	distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur. ....	74
Tabel 1.5	Jumlah Bantuan Pemerintah 2015.....	85
Tabel 1.6	Perbandingan Kisaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Adanya Perhatian dari Pemerintah (Dinas Koperindag) per bulan .....	91
Tabel 1.7	Pendapatan Penjahit (Tenaga Kerja) per Bulan .....	92
Tabel 1.8	Jumlah Bantuan dari Pemerintah Tahun 2015 .....	94
Tabel 1.9	Jumlah Pemilik Usaha dan Pekerja (Penjahit) tahun 2015 .....	94

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Pekon Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu tahun 2015. ....	11
Gambar 1.2	Peta Pekon Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu tahun 2015. ....	70
Gambar 1.3	Peta Pekon Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Bardasarkan Google Maps. ....	70



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Berita Acara Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 07  
tahun 2017 tentang penunjukan dosen pembimbing skripsi  
mahasiswa semester genap tahun akademik 2016/2017

Lampiran 3 : Surat Riset oleh KESBANGPOL Kabupaten Pringsewu

Lampiran 4 : Surat Pernyataan Revisi Judul

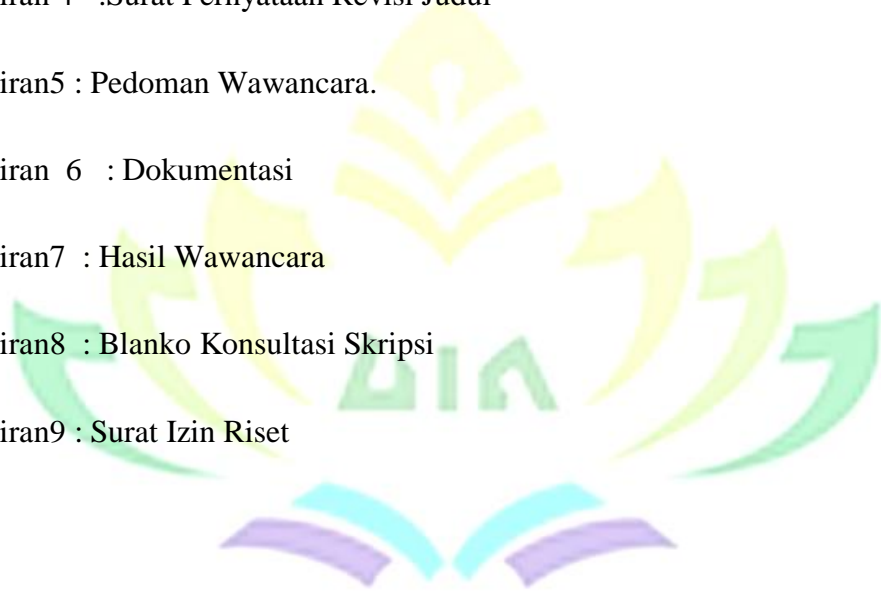
Lampiran 5 : Pedoman Wawancara.

Lampiran 6 : Dokumentasi

Lampiran 7 : Hasil Wawancara

Lampiran 8 : Blanko Konsultasi Skripsi

Lampiran 9 : Surat Izin Riset



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, terlebih dahulu akan diberikan penegasan judul. Dalam penegasan judul, penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini. Pemberian penegasan judul diperlukan untuk memberi batasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Hal ini bertujuan agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksudkan dan untuk menghindari kekeliruan pada pembaca. Adapun judul skripsi ini adalah **“Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UKM di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Prespektif Ekonomi Islam (Studi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kain Percadi Desa Sukamulya Binaan Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu)”** pada bagian ini penulis akan menjelaskan istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

#### 1. Peranan

Aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu hasil yang diinginkan .<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Ilmu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 2010 hlm.

## **2. Pemerintah Daerah**

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan pemerintah daerah pada judul yang dibahas, adalah dinas koperindag. Dinas Koperindag adalah lembaga yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Dalam melaksanakan fungsinya guna menumbuhkembangkan sektor perekonomian masyarakat daerah, yang diutamakan pada sektor usaha kecil dan menengah.<sup>2</sup>

## **3. Pemberdayaan**

Komunikasi lokal memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka, mereka dibuat agar memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengejar pelaksanaan atau implementasi inisiatif itu dengan kemampuan sendiri.<sup>3</sup> Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang

---

<sup>2</sup>Undang-Undang No.25, Pustaka Tinta Mas, Surabaya 2009, hlm 113

<sup>3</sup> Muchtar Mashud, *Jurnal Media Inovasi*, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2009, hlm 50

sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai simultan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, maka dipengaruhi salah satunya pengembangan UMKM.<sup>4</sup>

#### **4. Perspektif Ekonomi Islam**

Ekonomi adalah Ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia, sedangkan Islam adalah suatu agama yang didasarkan pada Al-quran dan Sunnah yang memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhan, ataupun manusia dengan sesama makhluk Tuhan.<sup>5</sup> Ekonomi Islam adalah Ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-quran dan sunnah.<sup>6</sup> Jadi makna dari Ekonomi Islam adalah ekonomi yang dikendalikan oleh nilai-nilai akidah islam. Ekonomi Islam lebih sebagai pandangan Islam yang kompleks sebagai ekspresi akidah Islam

---

<sup>4</sup> Alief Rakhman Setyanto, Bhimo Rizky Samodra, Yogo Pasca Pratama, *Jurnal Etikonomi*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2015, hlm. 206

<sup>5</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm, 15

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 199



dengan nuansa yang luas dan target yang jelas.<sup>7</sup> Oleh karena itu, sesuai dengan penjelasan diatas , maka pemerintah harus menjalankan tugasnya sebagai pemimpin rakyat dengan memegang prinsip-prinsip Islam. Pemerintah harus memperhatikan masyarakatnya salah satunya dengan memberdayakan ekonomi masyarakatnya agar masyarakatnya maju.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Dalam penelitian ini yang menjadi alasan mendasar dalam memilih judul ini adalah :

### **1. Alasan Objektif**

Banyaknya UKM yang ada di Kabupaten Pringsewu yang kini semakin pesat perkembangannya hampir seluruh pelosok daerah-daerah yang ada di Kabupaten Pringsewu terdapat UKM. Dinas Koperindag sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan asas otonomi dapat membantu mengembangkan UKM yang berada di Kabupaten Pringsewu khususnya Industri Kecil Menengah kain perca yang berada di desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

---

<sup>7</sup> Chaidir Nasution, "Sekilas Tentang Ekonomi Islam dan Konvensional". *IPI Jurnal Asas*, 2013, hlm.1.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai berdasarkan jurusan yaitu ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung, yang merupakan sesuai kajian keilmuan yang berkaitan dengan pemberdayaan UKM (masyarakat).
- b. Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena tersedianya sumber dari literatur yang tersedia dipergustakaan ataupun sumber lainnya seperti jurnal, artikel dan yang diperlukan.

## C. Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Terkait dengan program pembangunan, bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan

mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik atau material. Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri. Berkaitan dengan hal ini, bahwa keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat.<sup>8</sup>

Lebih dari 90% pelaku usaha di Indonesia masih didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tentang UMKM ini, di samping merupakan bagian terbesar dilihat dari unit bisnisnya, juga terbesar dalam menyerap tenaga kerja, tidak membutuhkan modal (investasi dan operasional), serta paling tahan menghadapi krisis multi-dimensi yang pernah melanda Indonesia sejak pertengahan 1997. Tetapi, kenyataannya lain menunjukkan bahwa UMKM termasuk golongan pelaku usaha ekonomi lemah. Tidak saja lemah dalam kepemilikan modal atau aset, lemah pengetahuan, lemah keterampilan dan teknologi yang digunakan, lemah aksesibilitasnya terhadap kebijakan, modal, pasar dan informasi, seringkali juga lemah dalam semangatnya untuk maju.

Perhatian pemerintah ditunjukkan dengan cara memberikan berbagai kemudahan untuk terlaksananya usaha kecil, dari mulai memberikan

---

<sup>8</sup> Kesi Widjajanti, Model Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Semarang, Juni 2011, hlm. 15-27

keringanan pajak, kemudahan mendapatkan izin usaha, serta memberikan pengarahan dan pembinaan bagi para pelaku usaha kecil.<sup>9</sup> Dengan adanya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Pringsewu sebagai basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Dinas Koperindag merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tujuan hidup antara lain pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan bagi setiap manusia, dan tersediannya peluang bagi setiap manusia untuk hidup terhormat serta distribusi pendapatan kekayaan yang adil dan merata.<sup>10</sup> Dan dalam upayannya mencapai tujuan hidup tersebut, perlu adanya kesempatan bagi masyarakat yang berusaha sesuai dengan kemampuannya dan keahlian yang mereka miliki. Salah satunya yaitu mendirikan usaha kecil dan menengah (UKM). Namun persaingan yang harus dihadapi oleh UKM dengan pengusaha besar menjadi tantangan sendiri yang harus dihadapi oleh pelaku UKM, dalam hal ini adanya mitra yang dapat membantu dalam permodalan, manajemen dan pemberdayaan akan sangat membantu dalam ketatnya persaingan usaha kedepannya.

Dengan tidak adanya peranan aktif anggota-anggotanya, terutama pengurusnya, tanpa didukung oleh kesadaran masyarakat, termasuk para pejabat yang berwenang dalam ruang lingkup gerakan koperasi, koperasi tidak mungkin melaksanakan tugasnya seperti yang dimaksudkan dalam

---

<sup>9</sup> Ady Imam Taufiq, *Cara Mudah Melakukan Usaha Kecil*, Siklus Hanggar Kreator, Yogyakarta, 2009, Hlm 17

<sup>10</sup> Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000. Hlm 1

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 beserta penjelasannya. Jadi pemerintah dan rakyat Indonesia harus mendukung dan anggota-anggota koperasi sendiri harus berperan aktif dalam gerakan koperasi ini.<sup>11</sup> Karena sudah tercantum dalam pasal, Undang-undang yang mengajarkan kita tentang asas tolong menolong kepada sesama, dalam hal ini sudah jelas peran pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) agar dapat membantu menstabilkan dan mensejahterakan perekonomian masyarakat.

Melihat problem diatas, dibutuhkan suatu lembaga khusus yang dapat menampung serta membantu masyarakat khususnya para pengusaha kecil dan menengah dalam membantu perkembangan UKM kedepannya. Dengan adanya kesempatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam memperoleh pemberdayaan diharapkan tidak saja akan menimbulkan produktifitas dan daya saing dengan pelaku usaha yang sudah besar tetapi juga dapat menyediakan peluang usaha dan kesempatan kerja yang lebih luas lagi bagi masyarakat, dan pada akhirnya juga akan membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran.

Menurut ilmu ekonomi Islam, pemerintah mempunyai peran penting dalam perekonomian. Para ulama dan pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah telah membahas peran penting pemerintah dalam perekonomian. Menurut para ulama, dalam ekonomi Islam, pemerintah memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan peran penting

---

<sup>11</sup> Sagimun, *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*, Cet. 3, PT. IdayuPress, Jakarta, 2007, hlm 106-108

tersebut, dengan syarat bahwa hal itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, dimana segala keputusan diambil sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat yang sebenarnya.<sup>12</sup>

Meskipun Islam memberikan peran kepada pemerintah secara luas, hal itu tidak berarti bahwa konsep ekonomi Islam mengabaikan kemerdekaan individu. Betapa pentingnya peran pemimpin untuk mengatur segala urusan yang di pimpinnya, dalam hadist shahih muslim no.3408 sudah sangat jelas mengenai pertanggungjawaban seorang muslim yaitu :<sup>13</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه بخاري ومسلم)

Artinya : “Diriwayatkan Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannta juga akan ditanya perihal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian

---

<sup>12</sup> Siti Mujaitun, *Jurnal Peran Pemerintah Tentang Pengembangan Perekonomian dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2013

<sup>13</sup> Hadist Shahih Riwayat Bukhori dan Muslim, Semarang. Pustaka As-Sunnah . hadist no. 3408



*pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya. (HR. Bukhori dan Muslim)*

Berdasarkan hadist di atas, jelaslah bahwasannya Allah SWT akan mencatat semua perbuatan yang dilakukan hamba-Nya dan dimintai pertanggungjawaban kelak diakhirat nanti, apalagi dia sudah ditunjuk sebagai pemimpin untuk bertanggung jawab atas semuanya. Oleh sebab itu dibutuhkan rumusan kebijakan dari lembaga eksekutif maupun legislatif untuk menumbuhkembangkan industri dalam negeri sebagai prasyarat meningkatkan pendapatan negara. Perkembangan industri pada sebuah negara sangat menopang pertumbuhan ekonomi, sehingga salah satu strategi yang diambil oleh pemerintah adalah membuat lembaga yang khusus mengelola atau memberdayakan Usaha Kecil Menengah tersebut.

Lebih lanjut lagi mengenai hal yang akan dikaji lebih mendalam oleh penulis adalah bagaimana peranan pemerintah daerah terhadap pemberdayaan UKM kain perca desa Sukamulya kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu perspektif ekonomi islam. Hal tersebut didasari asumsi bahwa sektor UKM tersebut semakin berkembang pesat sampai keberbagai kecamatan di Kabupaten pringsewu, namun kurangnya sentuhan pemerintah terhadap industri tersebut.

Menurut peneliti, Industri yang sangat menarik adalah industri kerajinan. Industri kerajinan termasuk pada industri kecil. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 menetapkan bahwa tugas pokok dan fungsi

pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menghasilkan kemandirian dan pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Industri kerajinan menghasilkan produknya melalui keterampilan-keterampilan. Salah satu industri yang menghasilkan produknya melalui keterampilan adalah industri kerajinan kain perca. Kain perca merupakan kain sisa dari produsen kain atau industri garmen. Kain sisa ini ukurannya bervariasi, lebarnya berukuran sekitar 5 - 40 cm, sedangkan panjangnya sekitar 3 – 5 m. Kain perca dikatakan limbah bagi perusahaan yang menghasilkan perca tersebut karena tidak berguna lagi. Bagi masyarakat Pekon Sukamulya kain perca bukanlah limbah, tetapi kain perca adalah bahan baku untuk membuat sesuatu.

**Gambar 1.1 Peta Pekon Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu**



\*Sumber : Monografi Pekon Sukamulya, 2015 <sup>14</sup>

Kemajuan sebuah industri didukung dengan lancarnya arus transportasi untuk mendistribusikan hasil produksinya ke berbagai daerah

<sup>14</sup>Hasil dokumentasi di Arsip Dinas Koperindag, pada 15 maret 2017

atau pun untuk pengiriman bahan baku. Sarana transportasi seperti pelabuhan, bandara, stasiun kereta api sangat membantu mempercepat pengiriman barang dari satu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, kondisi jalan yang baik juga membantu memperlancar arus transportasi. Secara tidak langsung, hal ini dapat membantu perkembangan suatu industri. Namun melihat kondisi jalan menuju ke desa Sukamulya yang merupakan sentra kain perca terbesar di Lampung kondisinya cukup prihatin. Dan arus transportasi pun jarang melewati desa Sukamulya.<sup>15</sup>

**Tabel 1.1**

**JUMLAH PEMILIK USAHA**

Nama Pemilik Perusahaan	Produk yang Dihasilkan	Jumlah Produksi		Tenaga Kerja	Modal
		Jumlah	Satuan		
Nova Kurohman	Kain Perca	20.000	Buah	200	100jt
M. Rohim	Kain Perca	10.000	Buah	115	80jt
Dirin	Kain Perca	7.000	Buah	52	80jt
Maman	Kain Perca	5.000	Buah	70	50jt
Suherman	Kain Perca	14.000	Buah	200	100jt
Entas Sulaiman	Kain Perca	2.000	Buah	70	20jt
Ahmad	Kain Perca	2.000	Buah	24	30jt
Ulung Supriadi	Kain Perca	1.500	Buah	32	60jt
Pujoko	Kain Perca	6.500	Buah	56	70jt
Dwi Wahrenro W	Kain Perca	4.000	Buah	60	40jt
Mutatohirn	Kain Perca	6.000	Buah	50	50jt
Siti Ruminah	Kain Perca	3.000	Buah	40	25jt
Sutirah	Kain Perca	4.000	Buah	40	40jt

*\*Sumber : Data Dokumentasi Pebeliti (data Dinas Koperindag tahun 2015)<sup>16</sup>*

Pekon Sukamulya, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu merupakan sebuah pekon yang masyarakatnya kreatif dengan berbagai

<sup>15</sup>Hasil Survei peneliti , pada 15 maret 2017

<sup>16</sup>Hasil dokumentasi di Arsip Dinas Koperindag, pada 15 maret 2017

kerajinan yang dimiliki, khususnya kerajinan dalam membuat kain perca menjadi memiliki nilai estetis dan nilai ekonomis. Hal ini didukung oleh kemauan masyarakat untuk belajar menjahit serta bantuan mesin jahit. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan bantuan mesin jahit kepada 13 anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pengrajin kain perca Pekon Sukamulya, harapannya mesin jahit tersebut dapat bermanfaat dan membantu kelancaran usaha kain perca. Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Dinas Koperindag) memberikan bantuan 8 mesin jahit.<sup>17</sup> Tentunya bantuan-bantuan tersebut sangat bermanfaat dan membantu kelancaran usaha kerajinan kain perca.

Menurut salah satu pemilik UKM kain perca, karena dengan adanya 13 pemilik usaha kain perca ini yang didominasi oleh keluarga dan kerabat terdekat maka bantuan-bantuan yang ada otomatis hanya diberikan kepada keluarga-keluarganya saja, sehingga pemilik usaha dan tenaga kerja lainnya tidak mendapatkan bantuan tersebut dan dapat dikatakan bahwa tenaga kerja yang tidak berdaya, karena bantuannya tidak merta dan juga banyak keluhannya yang ditujukan kepada pemerintah kabupaten Pringsewu, mengingat industri kain perca di desa Sukamulya ini merupakan industri kain perca terbesar di Lampung, pemerintah tidak serta merta mendukung dari segi bantuan dana atau pinjaman modal, pemilik yang mengeluhkan sulitnya untuk mendapatkan pinjaman modal oleh pemerintah sehingga para pemilik

---

<sup>17</sup>Hasil survei dan wawancara di Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu

UKM selalu stagnan dalam memproduksi kain perca, sehingga akan sulit untuk berkembang.<sup>18</sup>

Dari bahasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UKM Di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Perspektif Ekonomi Islam ( Studi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kain Perca di Desa Sukamulya Binaan Koperindag Kabupaten Pringsewu)”**. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai topik tersebut.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Peranan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Pengrajin Kain Perca di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu?
2. Apakah Peranan Pemerintah Daerah terhadap Pemberdayaan Pengrajin Kain Perca di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam?

---

<sup>18</sup>Hasil dari wawancara dengan salah satu pemilik usaha kain perca, pada 15 maret 2017

## **E. Tujuan Penelitian**

Dipilihnya masalah peran pemerintah terhadap pengembangan pasar sebagai tema penelitian proposal ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis Peranan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan pengrajin kain perca di desa Sukamulya kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.
2. Mengetahui dan menganalisis Pandangan Ekonomi Islam terhadap Peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan pengrajin kain perca di desa Sukamulya kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reserch*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit baik individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>19</sup>

#### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang peranan Dinas Koperindag serta penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data,

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm 213



jadi ia juga menyajikan data, menganalisis serta menginterpretasikan. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>20</sup>

Dalam kaitannya dengan penelitian ini menggambarkan apa adanya, tentang hal-hal yang berkenaan dengan Peranan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan terhadap pemberdayaan pengrajin di desa Sukamulya kecamatan Banyumas kabupaten Pringsewu dalam Perspektif Ekonomi Islam.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### b. Jenis Data

Dalam usaha untuk mencari kebenarannya, penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian.<sup>21</sup>

### c. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua data yaitu data primer dan data skunder.

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>22</sup> Data primer yang dimaksud

---

<sup>20</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 47

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 92

adalah data-data yang penulis peroleh secara langsung dengan melakukan interview (wawancara) terhadap staff, kepala bidang UKM, dan beberapa pelaku UKM di desa Sukamulya.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder dengan mengutip literature dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan data-data dari Dinas Koperindag atau Intansi pemerintahan lainnya.

## 3. Informan Penelitian

Dalam peneliti kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah purposive sample. Purposive sample adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja atau penjahit (1000 orang), pemilik UKM (13 orang), dan Pemerintah Daerah atau Dinas Koperindag (2 orang).
- b. Sedangkan sampel yang digunakan adalah sebanyak 41 orang sebagai sampel, yang terdiri dari pekerja atau penjahit (26

---

<sup>22</sup> Munajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2003, hlm. 8

<sup>23</sup> Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian: Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Rev. Ed., UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2008, hlm. 71

orang), pemilik UKM (13 orang), dan dinas Koperindag (2 orang).

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### a. Observasi

Adapun pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi sistematis yaitu pengamatan yang dilakukan dengan membatasi secara tegas wilayah atau ruang lingkup sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Alasannya adalah memudahkan kegiatan observasi dan agar kegiatan observasi ini lebih terarah dan tidak keluar dari masalah dan tujuan penelitian. Observasi ini bertujuan mengetahui apa peranan pemerintah daerah terhadap pemberdayaan pengrajin kain perca di desa Sukamulya.

##### b. Wawancara(*Interview*)

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk melakukan studi pendahuluan demi menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.<sup>24</sup> Dalam proses ini penulis melakukan wawancara yang tidak berstruktur yaitu melakukan wawancara yang bersifat bebas (berbincang-bincang) dengan staff

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 137

dan kepala bidang perindustrian yang memegang informasi tentang Dinas Koperindag kabupaten Pringsewu selain itu juga penulis melakukan wawancara dengan pelaku UKM (pengrajin kain perca).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tulis ataupun film sumber tertulis dapat terbagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber, arsip dokumen pribadi ataupun resmi. Misalnya catatan harian, biografi, peraturan, kebijakan, foto dan lain-lainnya. Adapun pelaksanaan metode ini adalah dengan mencatat data yang ada pada dokumen-dokumen, catatan harian, buku pedoman, dan arsip yang ada pada Dinas Koperindag kabupaten Pringsewu.

5. Pengolahan Data

Setelah sumber mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan cara pemeriksaan data (editing).

Pemeriksaan data (editing) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, 2008, hlm 126

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yang telah diperoleh, yaitu:

1. Reduksi Data

Pada langkah ini proses yang dilakukan adalah menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan dan memindahkan data mentah yang diperoleh terkait masalah yang diteliti, untuk kemudian hasilnya dirangkum guna menemukan data penting yang dapat mengungkapkan permasalahan yang diteliti.<sup>26</sup>

2. Penyajian Data

Yaitu langkah menampilkan data yang diperoleh dari hasil reduksi data yang telah dilakukan sebelumnya, untuk kemudian data dihimpun dan diorganisasikan berdasarkan fokus masalah yang diteliti, sehingga menjadi suatu penjelasan yang bermakna.<sup>27</sup>

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah ini dilakukan secara simultan dengan reduksi data dan penyajian data. Pada langkah ini, yang dilakukan adalah mensinkronkan data dengan teori yang ada. Data yang diperoleh diverifikasi dengan data yang lain sehingga ditemukan satu kesepahaman tentang suatu objek yang diobservasi. Untuk mendapatkan keakurasian data, maka dilakukan pengujian data silang. Sedangkan untuk penarikan kesimpulan, parameter yang dijadikan acuan adalah apabila semua data yang diamati telah sesuai

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.205

<sup>27</sup> Maman Rachman, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Semarang: IKIP Semarang Press, 2011, hlm. 210

dengan kerangka umum observasi dan wawancara yang telah dilakukan, maka dapat dinilai sangat baik. Namun jika ternyata dari data yang diamati hanya sebagian besar ( bukan semua data) yang sesuai dengan kerangka observasi maupun wawancara, maka dapat dinilai baik.

#### 6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik dari lapangan maupun pustaka, maka selanjutnya menganalisa data sesuai dengan permasalahannya. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif yaitu metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Adapun metode berfikir yang dipakai pada penelitian ini adalah Metode Deduktif.

Metode deduktif adalah cara berfikir yang berdasarkan pada pengetahuan-pengetahuan umum, fakta-fakta yang umum, fakta-fakta yang unik dan merangkai fakta-fakta yang umumitu menjadi suatu pemecahan yang bersifat khusus.<sup>28</sup> Dengan metode tersebut akan diuraikan secara umum tentang Peranan Pemerintah Daerah terhadap Pemberdayaan Pengrajin kain perca di desa Sukamulya kecamatan Banyumas kabupaten Pringsewu perspektif Ekonomi Islam kemudian akan ditarik kesimpulan secara khusus dari penafsiran awal.

---

<sup>28</sup> Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm 32



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Peran Pemerintah terhadap Pemberdayaan Masyarakat**

##### **1. Sejarah berdirinya Dinas Koperindag**

Sebuah komunitas masyarakat dapat hidup dengan layak dan sejahtera pasti berkat seorang pemimpin, karena pemimpin adalah yang berwenang dan juga yang berhak mengatur serta memberikan kebijakan kepada seluruh komunitas masyarakat. Dan untuk mencapai sebuah kesejahteraan dalam kehidupan sebuah komunitas masyarakat disunia dibutuhkan sosok seorang pemimpin yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Melalui Keppres Nomor 108 Tahun 2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Menteri Negara, maka Menteri Negara Koperasi dan UKM ditetapkan membawahi Setmeneg, Tujuh Deputi, dan Lima Staf Ahli. Melalui Keppres Nomor 101 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, maka dikukuhkan kembali Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk daerah pusat. Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian pada bab XI pasal 37 mengenai peranan pemerintah, pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengawasan perlindungan dan fasilitas terhadap koperasi serta memampukannya untuk melaksanakan pasal 33 Undang-undang Dasa 1945 beserta penjelasannya guna melaksanakan kewajiban tersebut, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Koperasi untuk mengatur diri sendiri, pemerintah dengan peraturan pemerintah menetapkan kebijakan, mengatur pembinaan, bimbingan, pemberian fasilitas, perlindungan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Koperasi. Menteri menunjuk pejabat dan menetapkan batas-batas wewenang pejabat yang disertai tugas di bidangnya.<sup>29</sup>

Demikian juga di daerah harus dapat mengatur pembinaan, bimbingan, pemberian fasilitas, perlindungan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dengan mendirikan Departemen maupun Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki program pemberdayaan masyarakat sebagaimana terefleksi dalam Renstranya masing-masing daerah. Salah satu langkah pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya guna yakni dengan mendirikan Dinas Koperindag.

---

<sup>29</sup>Undang-Undang No.25 Tahun 1992, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm 113



Dinas Koperindag adalah lembaga yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Dalam melaksanakan fungsinya guna menumbuhkembangkan sektor perekonomian masyarakat daerah, yang diutamakan pada sektor usaha kecil dan menengah. Dinas Koperindag secara intensif juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap para pelaku usaha serta konsumen. Hal ini dilaksanakan untuk menciptakan iklim usaha yang aman, nyaman, dan saling menguntungkan. Selain itu, Dinas Koperindag juga bertanggung jawab atas pemantauan ketersediaan pasokan dan distribusi barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

## **2. Peran dan Fungsi Dinas Koperindag**

### **a. Peran Dinas Koperindag**

Dinas Koperindag mempunyai tugas menyelenggarakan sebagaimana urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>30</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tugas pokok dan

---

<sup>30</sup> Perda Nomor 13 Tahun 2009, [Http://tugaskoperindag.com](http://tugaskoperindag.com), Akses pada 14 Maret 2017

fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menghasilkan kemandirian dan pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Dalam konteks ini, peran pemerintah adalah sebagai berikut: <sup>31</sup>

1. Pemerintah sebagai fasilitator
2. Pemerintah sebagai Regulator
3. Pemerintah sebagai Motivator

#### **b. Fungsi Dinas Koperindag**

Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Koperindag mempunyai fungsi sebagai berikut <sup>32</sup>:

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan penetapan standar atau pedoman bidang koperasi,UMKM, perindustrian dan perdagangan
- 2) Pembinaan, pengawasan kelembagaan dan pemberdayaan Koperasi di tingkat Provinsi
- 3) Pengembalian iklim serta kondisi mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah Provinsi
- 4) Pemberian bimbingan dan perlindungan koperasi lintas Kabupaten atau Kota
- 5) Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat Provinsi

---

<sup>31</sup> Surya Abraham, *Jurnal Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Ilmu Pemerintahan)*, Tahun 2016, hlm. 1047

<sup>32</sup> *Ibid*, Akses pada 14 Maret 2017

- 6) Fasilita akses penjaminan dalam penyediaan bagi UKM di tingkat Provinsi
- 7) Pemberian falsilitas usaha industri dalam rangka pengembangan UKM
- 8) Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri lintas Kabupaten atau Kota
- 9) Pemberian bantuan teknis dalam pencegahan pencemaran lingkungan oleh industri lintas Kabupaten atau Kota
- 10) Penyediaan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor
- 11) Pembinaan, koordinasi dan pengawasan perdagangan
- 12) Pembinaan, sosialisasi, informasi dan publikasi penyelenggaran perlindungan konsumen tingkat Provinsi
- 13) Pembinaan dan pengendalin kemetrolagian skala Provinsi
- 14) Pelaksanaa pembinaan dan pengembangan UKM, perindustrian dan perdagangan di tingkat Provinsi
- 15) Pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelporan pelaksanaan bidang koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan
- 16) Pelyanan administrative.

## **B. Usaha Kecil Menengah (UKM)**

### **1. Pengertian Usaha Kecil Menengah**

Usaha kecil merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, hal ini terlihat dari jumlah tenaga kerja yang mampu diserap. Selain itu, tidak dapat disangkal bahwa pengusaha kecil, yang merupakan bagian terbesar dari pelaku bisnis di Indonesia mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan struktur perekonomian nasional. Oleh karena itu, berbagai upaya pemberdayaan perlu dilakukan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.<sup>33</sup>

Pengertian industri kecil di Indonesia masih sangat beragam. Departemen perindustrian dan Bank Indonesia misalnya mendefinisikan industri kecil berdasarkan nilai asetnya. Menurut kedua instansi ini, yang dimaksud dengan industri kecil adalah usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan), bernilai 600 juta. Sedangkan yang dimaksud industri kecil oleh kadin adalah usaha industri yang memiliki modal kerja kurang dari 150 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari 600 juta.<sup>34</sup>

Berbeda dari ketigabatasan tersebut karakter usaha kecil dan menengah di Indonesiamasih beragam dan tergantung dari konsep yang digunakan industri usaha kecil masih identik lemah. Kriteria

---

<sup>33</sup>Ertika Urie, Tesis *Perspektif Bisnis Syari'ah Pengembangan Usaha Kecil Perseorangan Informal Tradisional Di Bandar Lampung*, UIN Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm 72

<sup>34</sup>Sritua Arief, *agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA Institut of development And Economic Analysis, 2007 cet. 1, hlm 48

usaha kecil di Indonesia berbeda-beda tergantung pada fokus permasalahan yang dituju dan instansi yang berkaitan dengan sektor ini. Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten sejak tahun 1974 menggunakan pedoman jumlah tenaga kerja dalam mendefinisikan usaha kecil bila mana suatu usaha menggunakan jumlah tenaga kerja antara 5 dan 19 orang dikategorikan sebagai Usaha Kecil. Sedangkan Industri rumah tangga adalah usaha industri yang memperkerjakan kurang dari lima orang.<sup>35</sup>

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bab 1 pasal 1 yang dimaksud dalam UU ini adalah :<sup>36</sup>

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan badan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dalam Undang-Undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 48

<sup>36</sup> Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Jakarta: CV. Eko Jaya, 2008, hlm 4

yang bukan badan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilkakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usahaasing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.<sup>37</sup>
5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UKM sehingga maupun tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.<sup>38</sup>

Berdasarkan undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dimaksud dengan usaha kecil adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 5

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 6

memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Bab II pasal 2 yang dimaksud Asas dan tujuan berdasarkan :<sup>39</sup>

1. Kekeluargaan
2. Demokrasi Ekonomi
3. Kebersamaan
4. Efisiensi Berkeadilan
5. Berkelanjutan
6. Berwawasan Lingkungan
7. Kemandirian
8. Keseimbangan Kemajuan
9. Kesatuan Ekonomi Nasional

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bab II pasal 3 adalah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.<sup>40</sup> Adapun Prinsip dan Tujuan pemberdayaan bagian kesatu pasal 4 Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dan berprakarsa sendiri.
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- e. Penyelenggaran Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.<sup>41</sup>

Bagian dua tujuan pemberdayaan pasal 5 adalah tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm 7



Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bab IV pasal 6, Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).<sup>44</sup>

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 8

<sup>43</sup> Ady Imam Tufiq, *Cara Mudah Memulai Usaha Kecil*, Cet. 1 , Yogyakarta, Siklus Hanggar Kreator, 2009, hlm. 23

<sup>44</sup> Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008, *Op.Cit*, hlm.8

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

## **2. Jenis-jenis Usaha Kecil dan Menengah**

Fleksibelnya UKM dalam menghadapi hambatan membuat UKM mudah berpindah-pindah usaha, dari usaha satu ke usaha lainnya. Sesuai dengan kecendrungan yang ada perkembangan dunia usaha di Indonesia mengarah pada bermunculannya model-model UKM, diantaranya<sup>45</sup>:

### **a. Usaha Jasa**

Usaha jasa saat ini merupakan yang terbesar dan cepat pertumbuhannya dalam dunia usaha kecil. jasa juga membawa keuntungan yang sangat besar bagi wirausaha kecil yang mampu berinovasi tinggi. Misalnya, jasa penyewaan mobil, konsultasi manajemen, rumah produksi dan lain-lain.

### **b. Usaha Eceran**

Adalah bentuk usaha kecil yang ditekuni oleh wirausaha kecil. Usaha eceran adalah satu-satunya usaha yang menjual produk manufaktur yang langsung kepada konsumen.

---

<sup>45</sup> Nasrullah Yusuf, *Kewirausahaan (Inovasi dan Bisnis Kecil)*, Unila, Lampung, 2007, hlm 40

c. Usaha Distribusi

Usaha ini adalah satu-satunya usaha yang membeli barang dari pabrik atau produsen dan menjual kepada pedagang eceran.

d. Usaha Pertanian/ Agribisnis

Pertanian adalah bentuk usaha kecil yang tertua. Pada awalnya, hasil pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga, namun lama-lama menjadi sebuah usaha yang cukup besar karena adanya ketergantungan masyarakat satu sama lain.

e. Usaha Manufaktur

Usaha manufaktur merupakan suatu usaha kecil yang saat ini sering kali dikategorikan masuk dalam jenis industri kreatif. Contohnya, kerajinan tangan, percetakan dan lain-lain.

Usaha kecil merupakan usaha yang padat karya dan minim modal, sehingga kebanyakan usahanya merupakan usaha yang fleksibel dalam menghadapi hambatan dan banyak modelnya seperti usaha jasa, eceran, distribusi, pertanian dan manufaktur yang terbesar diseluruh plosok wilayah.

### **3. Keunggulan UKM**

Dibandingkan dengan usaha besar, usaha kecil memiliki perbedaan pada posisi pasar, gaya, managerial, jumlah karyawan, kemampuan

keuangan, bentuk organisasi, maupun kapabilitas staff, dari perbedaan tersebut memunculkan beberapa keunggulan pada usaha kecil, yaitu<sup>46</sup>

- a) Inovasi, usaha kecil lebih kreatif dalam menjalankan bisnisnya daripada perusahaan besar serta sangat inovatif dalam memunculkan ide-ide untuk barang dan jasa baru.
- b) Biaya rendah, usaha kecil memiliki biaya operasional yang rendah karena organisasinya kecil, upah pegawainya rendah, biaya produksi rendah, dan dapat menyediakan barang dan jasa yang harganya lebih murah dibandingkan perusahaan besar.
- c) Peluang pasara, usaha kecil mampu mengisi pluang pasar yang terisolasi dibandingkan dengan perusahaan besar yang harus mengeluarkan *overhead cost* yang tinggi.
- d) Layanan pelanggan, usaha kecil lebih mampu memberikan pelayanan yang superior kepada pelanggannya dibandingkan dengan perusahaan besar karena fleksibilitasnya tinggi dan penyesuaian produk dan jasa sesuai tuntutan pelanggan lebih cepat.

Keunggulan-keunggulan tersebut yang menyebabkan usaha kecil dan menengah banyak digeluti oleh masyarakat menengah kebawah dan diharapkan dapat terus menumbuhkan dan mengembangkan semangat pengusaha kecil untuk tetap berinovasi dan berkreasi dalam meningkatkan mutu penjualan.

---

<sup>46</sup> M. Syahril Yusuf, *Entrepreneurship*, Lentera Ilmu Cendikia, Jakarta, 2010, hlm 75

#### **4. Kelemahan UKM**

Dibandingkan dengan usaha besar, kelemahan usaha kecil terutama terletak pada<sup>47</sup>:

- a) Manajemen, usaha kecil umumnya memiliki manajemen yang kurang baik, sering mencampur adukkan urusan bisnis dengan rumah tangga, tenaga ahli sedikit, pengetahuan bisnis rendah.
- b) Dana, kurangnya dana untuk membeli bahan baku atau produk, membeli peralatan, sewa tempat, untuk promosi, melatih karyawan, dan arus kas yang tidak merata merupakan kelemahan yang umumnya terdapat pada usaha kecil.
- c) Peraturan pemerintah, kebijakan yang tumpang tindih (*over regulation*) dan inkonsistensi menyebabkan ketidak pastian berusaha dan ketidak pastian hukum, serta beban biaya. Biroaksi yang tidak efisien akibat kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan korupsi dalam setiap bentuk pelayanan publik menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hal tersebut yang menjadi penghambat pengembangan usaha bagi pelaku UKM.

#### **5. Perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah di Indonesia dan Lampung**

##### **1. Perkembangan di Indonesia**

Pertumbuhan UKM di Indonesia membawa dampak baik bagi perkembangan ekonomi. Satu hal yang patut menjadi perhatian

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm 76

adalah rasio kredit bermasalah alias non performing loan (NPL). Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), NPL gross perbankan semester pertama 2009 sempat menyentuh angka 4,5% dan akhirnya turun menjadi 3,8% di akhir 2009. Associate Director FitchRatings Julita Wikana mengungkapkan, berdasarkan diskusi dengan perbankan, penyumbang NPL terbesar adalah sektor small medium enterprise (SME) alias usaha kecil menengah (UKM), lalu sektor kredit korporasi. Sedangkan NPL di sektor kredit konsumen tergolong stabil.<sup>48</sup>

Karakteristik UKM di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AKATIGA, the Center for Micro and Small Enterprise Dynamic (CEMSED), dan the Center for Economic and Social Studies (CESS) pada tahun 2000, adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UKM dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi dan tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi.

UKM di Indonesia mempunyai peranan yang penting sebagai penopang perekonomian. Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada dasarnya adalah sektor UKM.

---

<sup>48</sup> Jurnal Ilmiah Berkala Empat Bulanan. ISSN 1411-9366 Volume 5 No. 1 Mei 2017

Berkaitan dengan hal ini, paling tidak terdapat beberapa fungsi utama UKM dalam menggerakkan ekonomi Indonesia, yaitu (1) Sektor UKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal, (2) Sektor UKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dan (3) Sektor UKM sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini.

Dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak beberapa waktu yang lalu, banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi, akan tetapi sektor UKM terbukti tangguh dan memiliki daya tahan yang relatif kuat dalam menghadapi krisis tersebut. Berdasarkan data yang dirilis oleh Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2000, tiga tahun pasca krisis (tahun 1997) saja sektor UKM telah mampu memberikan kontribusi yang mengesankan, yaitu dalam total pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional tahun 2000 sebesar 4,9 persen, sebanyak 2,8 persen berasal dari pertumbuhan sektor UKM (Primiana, 2009). Menurut data BPS tahun 2003, jumlah UKM di Indonesia adalah 42 juta unit atau 99,99 persen dari jumlah seluruh unit usaha di Indonesia. Sebanyak 99,85 persen terdiri dari skala usaha kecil dan 0,14 persen dari skala usaha menengah. Berdasarkan data tersebut

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar usaha di Indonesia berada pada skala usaha kecil dan menengah.<sup>49</sup>

## **2. Perkembangan di Lampung**

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (affirmative policy) terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dalam hal ini, pemberdayaan Koperasi dan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor), selain itu potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan Koperasi

---

<sup>49</sup> Bambang, [www.pusatstatistik.com](http://www.pusatstatistik.com). Akses pada 18 Mei 2017



dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job) serta pro environment.

Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada Koperasi dan UMKM, amat penting. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi dualistik dan timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri.

Tataran Mikro mencakup persoalan yang paling mendasar dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM yaitu pada karakteristik perilaku dan kapasitas pelaku usaha. Di tataran ini fokus pada upaya-upaya penumbuhan kewirausahaan dan budaya kerja, serta pengembangan sumberdaya pelaku usaha dan pengelola koperasi yang berdaya saing. Bahwa Koperasi dan UMKM telah memberikan berbagai sumbangsih dalam proses pembangunan nasional. Data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2013 jumlah Koperasi sebanyak

4.672 unit, hal ini mengalami kenaikan sebesar 4% apabila dibandingkan tahun 2012 yaitu 4.478 unit.<sup>50</sup>

Di sisi lain, kontribusi UMKM dalam ekspor non migas pada tahun 2010 mencapai Rp.175,89 triliun. Setidaknya UMKM menjadi penguat ekspor non migas 15,80% dari total ekspor non migas sebesar Rp. 1.112 triliun. Peran UMKM dalam ekspor ini merupakan bukti kemampuan dan daya saing produk UMKM di pasar bebas, sekaligus merupakan potensi yang harus terus dipelihara untuk menjaga kesinambungan perdagangan internasional dan meraih devisa lebih besar. Seiring dengan komitmen Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung untuk melakukan reformasi birokrasi, akan menjadi tonggak baru bagi pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Komitmen ini merupakan bagian penting untuk meningkatkan kinerja, yang sekaligus sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi rakyat. Berlakunya globalisasi ekonomi, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UMKM, sehingga dapat meningkatkan perannya sebagai penggerak utama pertumbuhan industri manufaktur dan kerajinan, agroindustri, ekspor non migas, dan penciptaan lapangan kerja baru.

Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku

---

<sup>50</sup>Suherman, [www.koperindaglampung.com](http://www.koperindaglampung.com), Akses pada 18 Mei 2017

usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal atau krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Penyusunan rencana strategis merupakan kerangka teknis dan kerangka besar sebagai empowering yang secara langsung menyentuh Koperasi dan UMKM di tanah air. Selanjutnya rencana strategis ini merupakan pedoman bagi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung periode 2015-2019, sekaligus sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di kabupaten/kota se- Provinsi Lampung.<sup>51</sup>

## **C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

### **1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5 P yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut<sup>52</sup>:

- a. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.

---

<sup>51</sup> Suherman, [www.koperasiumkm.lampungprov.go.id](http://www.koperasiumkm.lampungprov.go.id), Akses pada 18 Mei 2017.

<sup>52</sup> Oos M. Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung, Alfabeta, 2014,

Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

- b. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya, pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin

keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerimaan manfaat yang dikehendaki. Ada lima 5 program strategi pemberdayaan yang terdiri dari<sup>53</sup>:

- a. Pengembangan Sumber daya Manusia
- b. Pengembangan kelembagaan kelompok
- c. Pemupukan modal masyarakat (swasta)
- d. Pengembangan usaha produktif
- e. Penyediaan informasi tepat-guna

Adapun strategi pemberdayaan masyarakat, terdapat lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan UKM, khususnya dalam melakukan pendampingan sosial, yaitu<sup>54</sup>:

- a. Motivasi

Setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 89

<sup>54</sup> Totok Mardikunto, Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm. 170-171

pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan khusus bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar.

c. Manajemen diri

Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoprasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat, pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

d. Mobilisasi sumber daya

Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

e. Pembangunan dan pengembangan jejaring

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

## **2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui UKM**

Secara umum usaha kecil memiliki karakteristik sebagai usaha yang tergolong lemah baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, teknologi yang digunakan, permodalan, pemasaran, promosi dan juga kerja sama masih rendah. Oleh karena usaha ini perlu diberdayakan untuk mampu bersaing dan mandiri. Upaya untuk memberdayakan usaha kecil dimulai dari analisis kebutuhan dan masalah yang dihadapi para pengusaha kecil tersebut, perlu juga dipahami apa potensi yang bisa dikembangkan. Apakah usahanya memiliki keunggulan atau kekhasan yang bisa menjadi daya tarik dan diferensiasi bagi produk

kompetitif lainnya. Pengembangan usaha kecil juga perlu diperhatikan potensi lokal dan kearifan-kearifan lokal. Hal ini jika dipertahankan justru akan menjadi nilai kekhasan dan menjadi daya tarik dan memiliki nilai jual tinggi.<sup>55</sup> Dengan menganalisis kebutuhan dan masalah yang dihadapi para pengusaha kecil akan mempermudah pemberdayaan sehingga akan tepat sasaran.

Pemberdayaan usaha kecil tidak hanya dilakukan terhadap masyarakat yang telah memiliki usaha. Pemberdayaan dalam aspek ini justru yang utama adalah bagaimana masyarakat didorong untuk mampu mengembangkan berbagai usahanya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Menurut Freire dengan teori penyadaran menjelaskan bahwa pada setiap individu sesungguhnya mempunyai potensi untuk berkembang. Dengan demikian, sesungguhnya dalam setiap anggota masyarakat memiliki potensi untuk melakukan usaha dalam meningkatkan pendapatannya. Dalam hal ini agen pemberdayaan dituntut memiliki dan menerapkan kompetensi untuk analisis kebutuhan dan potensi sasaran. Selanjutnya agen pemberdayaan dituntut untuk menanamkan jiwa kewirausahaan.<sup>56</sup>

Suksesnya pemberdayaan dalam masyarakat tergantung pada agen pemberdayaan, bagaimana agen pemberdayaan dapat menganalisis kelemahan serta potensi yang ada pada setiap UKM, sehingga setiap program pemberdayaan dapat tepat sasaran selanjutnya dapat

---

<sup>55</sup> Oos M. Anwas, *Op.cit*, hlm. 124

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 125



mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada pada UKM sehingga UKM dapat secara mandiri menjalankan usahanya. Oleh sebab itu, tantangan selanjutnya adalah bagaimana secara bersama-sama menghimpun seluruh potensi dan sumber-sumber daya yang telah dimiliki dan selanjutnya didayagunakan dan dikembangkan secara maksimal guna meningkatkan kinerja dan daya saing UKM.<sup>57</sup>

Pemberdayaan usaha kecil yang utama adalah bagaimana membangun SDM yang tangguh, yaitu dengan cara mendorong kemampuan berfikir dan berperilaku inovatif serta diperlukannya keterampilan dan kemampuan dalam aspek managerial, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan kerja sama yang saling menguntungkan. Pengusaha kecil juga perlu mendapatkan pencerahan tentang perbankan, sehingga mereka bisa mengakses penambahan modal usaha.<sup>58</sup> Untuk itu diperlukan kegiatan pelatihan dan pendampingan secara berkesinambungan. Pemberdayaan usaha kecil diarahkan agar menjadikan pelaku usaha mampu meningkatkan wawasan dan kemampuannya, sehingga meninggalkan kebiasaan menjadi budaya baru dalam berbisnis yang lebih menguntungkan.

---

<sup>57</sup> Soeharto Prawirokusumo, *Ekonomi Rakyat Konsep, Kebijakan, dan Strategi*, Yogyakarta, BPFE 2009, hlm. 11

<sup>58</sup> Oos M. Anwas, *Op.Cit*, hlm. 125

## **D. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Ekonomi Islam**

### **1. Pengetrian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Ekonomi Islam**

Saat ini istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, pengalaman, modal usaha yang mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan dan kemiskinan.

Secara etimologi, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu. Imbuhan pada kata pemberdayaan mempunyai arti berusaha meningkatkan dengan melakukan sesuatu. Sedangkan didalam istilah bahasa inggris disebut dengan kata "*empowerment*".<sup>59</sup>

Menurut William Webster, *empowerment* memiliki dua arti, pertama berarti *ti give power or authority to*, yaitu memberikan kekuasaan atau kekuatan pada pihak lain. Dan pengertian kedua adalah *to give ability or enable* yaitu upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.<sup>60</sup>

Pemberdayaan umat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi yang kurang mampu

---

<sup>59</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, cet VIII, 2006, hlm. 233

<sup>60</sup> Onny S. Prijono, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta, CSIS.2009, hlm.3

melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.<sup>61</sup> Atau sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah umat dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif ekonomi islam.<sup>62</sup> Dengan demikian, pengembangan atau pemberdayaan masyarakat Islam merupakan model empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal soleh (karya terbaik), dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan tergantung pada sistem nilai yang mengatur perilakunya dalam pengalokasian sumber daya mengenai benar atau salah, baik dan buruk.

Menurut pandangan Islam, ekonomi harus dijalankan dengan cara islami yang mengatur kehidupan perekonomian, yaitu dengan ketelitian, cara berfikir yang berlaku pada nilai-nilai moral islam nilai-nilai ekonomi. Sebagaimana Manan dalam Heri Sudarsono mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial

---

<sup>61</sup> Rumadani Sagala, *Dakwah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Bandar Lampung: Fakta Press Fakultas Tarbiah, 2009, hlm. 10

<sup>62</sup> Nani Machendrwaty dan Agus Ahmad Safei, *Op.cit*, hlm.42

yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>63</sup>

Ekonomi Islam juga bermakna pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat.<sup>64</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi umat terkait erat dengan sumber daya manusia (*human reseorces development*), dimana sumberdaya manusia menjadi aspek sentral bagi kelangsungan perekonomian umat Islam.<sup>65</sup>

Pada dasarnya yang menjalankan pemberdayaan adalah masyarakat sendiri, untuk itu dengan menambah pengetahuan sumber daya manusia tentang nilai-nilai moral islam dalam kehidupan perekonomian diharapkan dapat meminimalisir ketidakadilan dalam memperoleh sumber daya yang ada.

---

<sup>63</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Ekonosia Fakultas Ekonomi UII, 2004, hlm. 13

<sup>64</sup> Umer Chapra, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hlm. 121

<sup>65</sup> Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung, Humaniora Pratama, 2001, hlm.3

## 2. Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi Islam

Pemerintah hendaknya memperhatikan dengan baik keadaan dan kondisi rakyatnya dan mengarahkan segala kemampuannya untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat baik masalah dunia atau agama serta memberikan rahmat dan kecintaan kepada mereka. Hubungan ini hendaklah diperkokoh dengan adanya upaya penguasa atau pemerintah untuk bercampur dan bergaul langsung dengan rakyat serta mengunjungi mereka untuk mencari tahu kebutuhan dan keadaan mereka, sebagaimana yang telah dilakukan Khalifah Umar bin Al Khathab *radhiyallahu'anhu* ketika beliau tidak tidur sebelum mengelilingi kota untuk mencari orang-orang yang membutuhkan bantuan dan perhatiannya. Sebagaimana dalam hadist shahih Bukhari-Muslim mengenai tanggungjawab manusia:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمرِ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  
فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ  
بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ  
وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ  
رَعِيَّتِهِ (رواه بخاري ومسلم)<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>Hadist Shahih Riwayat Bukhori dan Muslim, Semarang. Pustaka As-Sunnah. Hadist No.

Arinya : *“Diriwayatkan Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar r.a berkata : saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannta juga akan ditanya perihal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya. (HR. Bukhori dan Muslim)*

Berdasarkan hadist di atas, jelaslah bahwasannya Allah SWT akan mencatat semua perbuatan yang dilakukan hamba-Nya dan dimintai pertanggungjawaban kelak diakhirat nanti, apalagi dia sudah ditunjuk sebagai pemimpin untuk bertanggung jawab atas semuanya. Oleh sebab itu dibutuhkan rumusan kebijakan dari lembaga eksekutif maupun legislatif untuk menumbuhkembangkan industri dalam negeri sebagai prasyarat meningkatkan pendapatan negara.

a. Kewajiban Pokok

Kewajiban pokok dan asas pemerintah yang sesuai dengan Syari'at Islam adalah berusaha merealisasi tujuan diadakannya imamah (kepemimpinan) yaitu sebagai *Imamatu Addin wa Siyaasaatu Addunya* (pemimpin agama dan pengatur dunia). Tujuan pertama:

- 1). Menegakkan agama atau menegakkan syari'at, ini meliputi penjagaan dan pelaksanaannya.
  - 2). Mengatur dunia dengan dasar agama dengan kata lain ber hukum dengan hukum islam dalam seluruh aspek kehidupanny.
- b. kewajiban pendukung

Pemerintah juga memiliki kewajiban yang menjadi sarana dalam meujudkan tujuan-tujuan diatas, diantaranya:

1. Menunaikan hak-hak harta ke baitul mal
2. Memberikan perhatian kepada orang-orang yang mendasari segala perbuatannya dengan manhaj salaf dan tidak pernah memprovokasikan, menyebarkan perselisihan dan perpecahan.
3. Mengawasi pengaturan seluruh kegiatan negara dan mencari tahu keadaan rakyatnya.
4. Lemah lembut dan menasehati rakyatnya.
5. Menjadi contoh teladn yang baik bagi rakyatnya.

### **3. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Ekonomi Islam**

Prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat diperlukan karena pentingnya penggunaan nilai-nilai moral Islam dalam pemberdayaan umat guna untuk peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat dari kondisi yang kurang mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan.

Dalam kegiatan ekonomi Islam menurut Choundhury perumusan prinsip-prinsip ekonomi Islam mencakup :

- (1) tauhid dan persaudaraan,
- (2) kerja dan produktifitas dan
- (3) keadilan distribusi.

Selain ketiga prinsip tersebut, Murasa Sarkaniputra menambahkan

- (4) kebersamaan dan

- (5) kepemilikan sebagai prinsip ekonomi Islam.<sup>67</sup>

#### 1. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Allah adalah pemilik hakiki, manusia hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu sebagai ujian bagi mereka. Karena kepada Allah SWT kita akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.<sup>68</sup>

Allah SWT berfirman dalam surat Ali-Imran 3:191<sup>69</sup>

ضِ السَّمَوَاتِ خَلَقَ فِي وَيَتَفَكَّرُونَ جُنُوبِهِمْ وَعَلَى وَقُودًا قَيْنَمَا اللَّهُ يَذْكُرُونَ الَّذِينَ  
النَّارِ عَذَابَ فَقِنَا سُبْحَانَكَ بَطِلًا هَذَا خَلَقْتَ مَا رَبَّنَا وَالْأَر

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha suci Engkau,

---

<sup>67</sup> Murasa Sukarniputra, *Sistem Ekonomi Islam* ( Makalah disampaikan pada workshop analisis keuangan syari'ah pada pusat pengkajian Ekonomi Islam (P3EI) IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 13-20 mei 2016

<sup>68</sup> Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 35

<sup>69</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, CV. Darus Sunnah, Jakarta, 2007 (QS.Ali-Imran(3-191))



*Maka perihalahkan Kami dari siksa neraka". (QS. Ali-Imran 3:191)*

Berdasarkan kandungan ayat Ali-Imran ayat 191 di atas terlihatlah bahwa orang-orang yang mendalam pemahamannya dan berfikir tajam (*Ulul Albab*), yaitu orang yang berakal, orang-orang yang mau menggunakan pikirannya, mengambil faedah, hidayah, dan menggambarkan keagungan Allah SWT. Ia mengingat Allah SWT. (berzikir) disetiap waktu dan keadaan, baik di waktu ia berdiri, duduk atau berbaring. Jadi dijelaskan dalam ayat ini bahwa *ulul albab* yaitu orang-orang baik lelaki maupun perempuan yang terus menerus mengingat Allah dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi.<sup>70</sup>

Selain itu, ayat di atas menunjukkan bahwa orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun yang akan melakukan kegiatan perekonomian haruslah bersikap adil, bermoral pada sikap usahanya dan hanya orang-orang yang seperti itulah yang akan terhindar dari siksa api neraka. Meraka (pelaku ekonomi) berusaha mendasarkan konsep-konsep Islam tentang kebahagiaan, manusia dan kehidupan yang baik sangat menekankan aspek persaudaraan, keadilan dan pemenuhan kebutuhan baik secara materiil maupun spiritual.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> M. Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2002, hlm. 308

<sup>71</sup> Umar Chapra, *Islam dan Tentang Ekonomi*, Jakarta, Gema Insani, 2000, hlm. 112

## 2. Kerja dan Produktifitas

Manusia mewujudkan cita-citanya pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan jasmani maupun rohani adalah dengan bekerja. kerja adalah mengerahkan segala kemampuan dan kesungguhan yang dikerahkan manusia baik jasmani maupun akal pikiran untuk mengolah kekayaan alam untuk kepentingan umat islam.<sup>72</sup> Islam juga menganjurkan umatanya untuk melakukan aktifitas spiritual. Kemudian di anjurkan mencari nafkah karunia Allah SWT. Yang telah disediakan-Nya di muka bumi.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadist riwayat HR Bukhori no.1699 dijelaskan bahwa:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَا أَكَلْتُ حَذُطًا مَّا قَطَّخْتُ أَمْنًا نِيًّا كَلِمَةً مَعْلِيَّةً هُوَ إِنْ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانِيًّا كَلِمَةً مَعْلِيَّةً) رواه البخاري

Artinya :Diriwayatkan : ibrahim bin musa bahwa isa mengabarkan dari tsur dari kholid bin mi'dan dari miqdam r.a dari Rashululloh bersabda : makanan yang terbaik yang dimakan seseorang adalah dari hasil karya tangannya sendiri dan sesungguhnya Nabi Dawud A.s pun makan dari hasil kerjanya sendiri. (HR. Bukhori. 1996)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa manusia harus bekerja dan berusaha untuk mencari makannya , karena makanan yang baik untuk dimakan adalah dari hasil karya tangannya sendiri, dan

---

<sup>72</sup> Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta, Rabbani Pers, 2001, hlm. 146

sesungguhnya Nabi Dawud AS. Pun makan dari hasil kerjanya sendiri. Dan karena hanya dengan bekerja keras maka akan dapat memenuhi kebutuhan.

### 3. Keadilan Distribusi

'*Adl* (adil) adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.<sup>73</sup> Sedangkan keadilan ekonomi adalah konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi.<sup>74</sup> Jadi keadilan merupakan penempatan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang dengan memakai konsep persaudaraan.

Islam mengajarkan kepada setia manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatanyang dilakukan, Allah SWT berfirman dalam surat (An-Nisa (4): (58)<sup>75</sup>

لِّتَحْكُمُواْ إِلَى النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِهِ إِذَا أَهْلَاهَا إِلَى الْإِلَهِ مَنْتِ تَوَدُّوْاْ أَن يَأْمُرَكُمْ اللّٰهُ إِنَّ

بَصِيرَ أَسْمِعَا كَانَ اللّٰهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُ نِعْمًا اللّٰهُ إِنَّ بِالْعَد

---

<sup>73</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010,, hlm. 14

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 396

<sup>75</sup> *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta; Lautan Lestari, 2009

Artinya : *sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.*(Qs. An-Nisa (4): (58)

#### 4. Kebersamaan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya. Allah SWT menciptakan manusia beraneka ragam dan berbeda-beda tingkat sosialnya. Ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang kaya ada yang miskin dan seterusnya. Demikian Allah menciptakan manusia dengan keahlian dan kepandaian yang berbeda-beda pula. Semua itu adalah dalam rangka saling memberi dan saling mengambil manfaat. Orang kaya tidak dapat hidup tanpa ada orang miskin yang menjadi pembantunya, pegawainya, sopirnya, dan seterusnya. Demikian pula orang miskin tidak dapat hidup tanpa ada orang kaya yang memperkerjakan dan mengupahnya.<sup>76</sup> Demikianlah seterusnya. Allah SWT berfirman:

Artinya : *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian*

---

<sup>76</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Op.Cit.* hlm. 25

*mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Az-Zukhruf 43:32)<sup>77</sup>*

Dari makna ayat tersebut dapat menjelaskan mengapa Allah membagi antara mereka penghidupan mereka yakni karena banyaknya kebutuhan manusia yang tidak dapat disiapkannya secara mandiri, dia harus menjadi makhluk sosial. Dengan demikian, dia membutuhkan orang lain sehingga hal ini menjadikan mereka tolong menolong dan butuh membutuhkan.

#### 5. Kepemilikan

Kepemilikan adalah suatu ikatan seorang dengan hak miliknya yang disyahkan oleh syari'ah atau hak khusus yang didapatkan pemilik, sehingga ia mempunyai hak untuk menggunakan sejauh tidak melanggar garis-garis syari'ah.<sup>78</sup>

Ada tiga model kepemilikan dalam Islam yaitu: (1) Kepemilikan penuh ialah kepemilikan pada benda sekaligus hak pemanfaatannya. (2) hak milik saja tanpa hak pemanfaatannya. (3) hak pemanfaatannya saja (hak guna). Sedangkan berdasarkan bentuknya, kepemilikan di bagi dua yaitu: kepemilikan individu dan kepemilikan kolektif (ada hak orang lain dari setiap kepemilikan individu).<sup>79</sup>

Adapun tujuan pemberdayaan ekonomi islam adalah sebagai berikut:

---

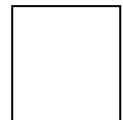
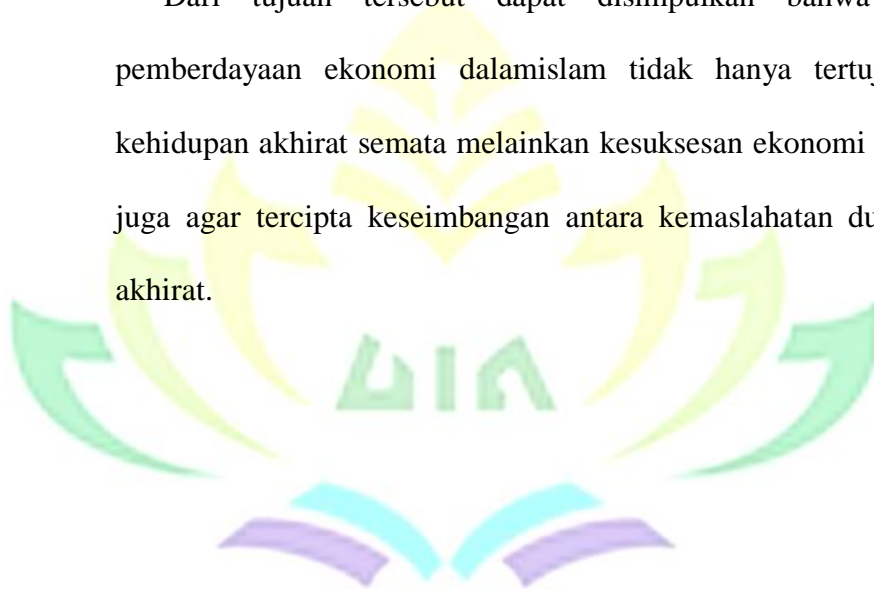
<sup>77</sup> *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta; Lautan Lestari, 2009

<sup>78</sup> M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, UII Press, 2002, hlm.46

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 47

1. Mengutamakan Allah dengan mencari kehidupan akhirat.
2. Memperjuangkan kebutuhan hidup akhirat dan jangan melupakan nasibnya di dunia.
3. Mensukseskan ekonomi yang diperhitungkan Allah, berbuat kebajikan sebagaimana Allah berbuat kebajikan kepadamu.
4. Negara menyingkirkan kebinasaan (kekacauan) dan janganlah membuat kebinasaan.<sup>80</sup>

Dari tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan ekonomi dalam islam tidak hanya tertuju pada kehidupan akhirat semata melainkan kesuksesan ekonomi di dunia juga agar tercipta keseimbangan antara kemaslahatan dunia dan akhirat.



### **BAB III**

#### **PENYAJIAN DATA LAPANGAN**

---

<sup>80</sup>Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta, Kalam Mulai, 2009, hlm. 232

## **A. Gambaran Umum Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas**

### **Kabupaten Pringsewu**

#### **1. Sejarah Berdirinya Pekon Sukamulya**

Berdasarkan sejarah yang tertulis dalam profil desa. Pekon Sukamulya berasal dari transmigrasi Pejuang Siliwangi yang dilakukan oleh BRN (Biro Rekonstruksi Nasional) pada tahun 1952 yang berasal dari Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.<sup>81</sup>

Transmigrasi tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk penghargaan dari Presiden Soekarno kepada Raden Puradireja (pemimpin Pejuang Siliwangi). Raden Puradireja adalah pemimpin pejuang Siliwangi yang ikut serta dalam perang revolusi. Beliau mendapat penghargaan bintang gerilya yang diberikan langsung oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno pada saat itu merasa bahwa Raden Puradireja telah berjasa untuk negara maka beliau pantas untuk mendapatkan penghargaan. Semula penghargaan yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Raden Puradireja hanya berupa jabatan sebagai Bupati Cianjur, namun Raden Puradireja menolak, dan memilih untuk mendidik masyarakat dalam bentuk perguruan silat. Akhirnya presiden memberikan tanah untuk kesejahteraan anggota pejuang siliwangi. Pada saat pengiriman pejuang siliwangi ke Sumatera (provinsi Lampung), Presiden Soekarno memberikan perintah bahwa pejuang siliwangi ditugaskan untuk mengusir penjajah

---

<sup>81</sup>Dihimpun dari *Arsip Pemerintah Pekon Sukamulya*, tahun 2015

yang ada di Sumatera. Tetapi sesampainya di Sumatera, tepatnya di Pelabuhan Panjang, rombongan pejuang Siliwangi diberikan perbekalan berupa sabit, golok, cangkul dan peralatan pertanian lainnya dan Pejuang Siliwangi diberikan pengarahannya serta penjelasan oleh BRN apa yang sebenarnya menjadi tujuan mereka.

Rombongan pejuang Siliwangi akhirnya 37 melakukan pembukaan lahan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Presiden Soekarno. Pembukaan lahan tersebut tersebar dalam beberapa kelompok sesuai dengan pembagian lahan yang dilakukan oleh pemerintah. Rombongan terdiri dari 300 kk – 370 kk dalam satu daerah. Pembukaan lahan tersebut dilakukan ke beberapa daerah di Provinsi Lampung dan salah satu diantaranya adalah Pekon Sukamulya.<sup>82</sup>

Rombongan Pejuang Siliwangi membentuk sebuah pemukiman dan memberi nama pemukiman tersebut dengan nama Sukamulya. Tetapi seiring perkembangan tersebut sebagian rombongan Pejuang Siliwangi merasa tidak nyaman di wilayah Sukamulya. Rombongan tersebut menjual lahan mereka dan memilih pulang ke kampung halaman (Kabupaten Bandung Jawa Barat). Mereka yang tetap bertahan memutuskan untuk menjalankan adat istiadat kebiasaan yang mereka lakukan di Pulau Jawa. Adat istiadat tersebut misalnya

---

<sup>82</sup>Dihimpun dari Arsip Pemerintah Pekon Sukamulya(*Sejarah Pekon*), tahun 2015



rangkaian kegiatan bagi yang akan berkeluarga seperti *neundeun omong, ngelamar, seserahan, ngeuyeuk seureuh*.<sup>83</sup>

- 1) *Neundeun omong* yaitu kunjungan orang tua jejak kepada orang tua si gadis untuk bersilaturahmi dan menyimpan pesan bahwa kelak anak gadisnya akan dilamar.
- 2) *Ngelamar* yaitu kunjungan orang tua jejak untuk meminang/melamar si gadis, dalam kunjungan tersebut dibahas pula mengenai rencana waktu pernikahannya.
- 3) *Seserahan* yaitu menyerahkan si jejak calon pengantin pria kepada calon mertuanya untuk dikawinkan kepada si gadis. Pada acara ini biasa dihadiri oleh para kerabat terdekat, di samping menyerahkan calon pengantin pria juga barang-barang berupa uang, pakaian, perhiasan, kosmetik dan 38 perlengkapan wanita, dalam hal ini tergantung pula pada kemampuan pihak calon pengantin pria.
- 4) *Ngeuyeuk seureuh* yaitu artinya mengerjakan dan mengatur sirih serta mengait-ngaitkannya. *ngeuyeuk seureuh* dimaksudkan untuk menasihati kedua calon mempelai tentang pandangan hidup dan cara menjalankan kehidupan berumah tangga berdasarkan etika dan agama, agar bahagia dan selamat.

---

<sup>83</sup>*Ibid*, hlm.5

Bahkan upacara adat keagamaan seperti upacara lebaran 1 syawal (upacara sungkeman, berkunjung ke rumah kerabat dan tetangga dan berziarah). Masih banyak lagi adat istiadat lainnya yang dilakukan pada saat di Kabupaten Bandung Jawa Barat. Pada tahun 1952 salah satu dari rombongan Pejuang Siliwangi diangkat menjadi kepala suku untuk memimpin penduduk yang tinggal di wilayah transmigrasi tersebut. Kepala suku tersebut memiliki posisi sebagai kepala desa yang memiliki tugas dan kewajiban kepada masyarakat. Seperti menetapkan peraturan yang telah menjadi kesepakatan bersama, membina kehidupan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan lain sebagainya.

Seiring berjalanya waktu, Sukamulya tumbuh menjadi pemukiman padat penduduk. Para pendatang dari berbagai wilayah bermunculan. Daerah-daerah baru sebagai wilayah pengembangan disekitar Sukamulya mulai dibuka oleh pendatang. Daerah pengembangan baru ini seperti Banyumas, Srirahayu dan daerah lainnya. Ketika Provinsi Lampung berdiri secara resmi pada tanggal 18 Maret 1964. Sukamulya tidak lagi dipimpin oleh kepala suku, melainkan dipimpin 39 oleh Kepala Desa. Pada tahun 2006 Sukamulya dipimpin oleh Kepala Pekon. Pekon Sukamulya telah dipimpin oleh enam Kepala Desa sejak Provinsi Lampung resmi dibuka hingga saat ini.

## **2. Visi dan Misi Desa Sukamulya**

#### **a. Visi Desa Sukamulya**

Visi pembangunan Pekon Tahun 2012-2017 ini disusun dengan memperhatikan/ mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu, maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Pekon Sukmaulya Tahun 2012-2017 adalah *“Sukamulya Bisa“ : Bersih, Indah, Sehat, Agamis. Bersama Membangun Landasan Ekonomi, Mental Masyarakat Dan Infrastruktur Pekon.*<sup>84</sup>

#### **b. Misi Desa Sukamulya**

Misi pembangunan Pekon adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Pekon, sesuai visi pembangunan Pekon yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Pekon dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Pekon Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Tahun 2012-2017 dapat dirumuskan sebagai berikut :<sup>85</sup>

1. Menciptakan kehidupan pribadi, keluarga dan lingkungan yang bersih, indah dan sehat
2. Memperkuat sumberdaya manusia dengan keimanan dan ketakwaan

---

<sup>84</sup> Dihimpun dari *Arsip Pemerintah Pekon Sukamulya*, tahun 2015

<sup>85</sup> Dihimpun dari *Arsip Pemerintah desa Sukamulya*, tahun 2015

3. Meningkatkan sarana prasarana yang menunjang usaha ekonomi masyarakat,
4. Membangun etos kerja yang tinggi, gemar bergotong royong dan rasa kebersamaan pada masyarakat
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekon

### **3. Keadaan Sosial Ekonomi Pekon Sukamulya**

Secara sosial ekonomi letak Pekon Sukamulya terhadap lalu lintas perdagangan cukup strategis. Hal ini dikarenakan jarak dari Pekon Sukamulya ke kecamatan hanya 1 km dan jarak ke ibukota kabupaten sekitar 15 km. Pekon Sukamulya berada di jalur transportasi dan dilalui oleh angkutan umum antar kecamatan/ daerah/ provinsi, sehingga memberi kemudahan mobilitas orang dan barang, hal ini tentu berdampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat, misalnya saja dampak positif terhadap industri kerajinan kain perca di Pekon Sukamulya.

Kondisi jalan yang baik membuat aktivitas membawa bahan baku dari luar daerah dan mengirimkan hasil kerajinan ke luar daerah menjadi lancar. Pekon Sukamulya selain menjadi akses transportasi juga sebagai daerah penghasil perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan. Hasil dalam setiap panen perkebunan mencapai 17 ton (terdiri dari perkebunan kelapa, kelapa sawit, coklat, karet, dan pala). Sedangkan hasil dari pertanian (cabe, jagung, padi sawah, ubi kayu) mencapai 21 ton. Perikanan mencapai hasil 2,3 ton (terdiri dari ikan

mas, lele dan mujair). Serta hasil dari peternakan mencapai 832 ekor (terdiri dari ayam, bebek, merpati, kelinci, kambing dan sapi) perhitungan dalam satu tahunnya.

#### **4. Kondisi Geografis Desa Sukamulya**

Keadaan geografis dalam penelitian ini menyajikan gambaran tentang letak astronomis, letak administratif dan luas wilayah Pekon Sukamulya.<sup>86</sup>

##### **a. Letak Astronomis**

Letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi sedangkan garis bujur merupakan garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Secara astronomis letak Pekon Sukamulya adalah 104o 55' 25" BT sampai dengan 104o 56' 17" BT dan 050o 17' 13" LS sampai dengan 050o 18' 9" LS. Batas tersebut menunjukkan wilayah Pekon Sukamulya masih berada pada zona sedang utara. Pada zona ini masuk dalam daerah tropis. Wilayah Pekon Sukamulya memiliki curah hujan 2.500 mm/hm dengan suhu rata-rata antara 240-320 C.

##### **b. Letak Administratif**

Secara administratif Pekon Sukamulya termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu. Pekon

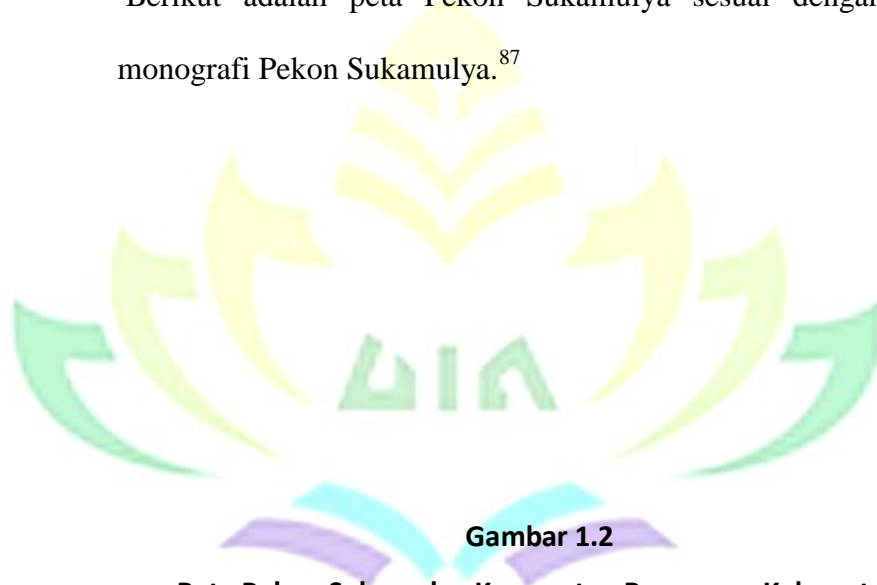
---

<sup>86</sup>Dihimpun dari Arsip Pemerintah Pekon Sukamulya(*Monografi*), tahun 2015

Sukamulya terbagi ke dalam tiga 32 dusun dan dua belas RT. Adapun batasan-batasan administratif Pekon Sukamulya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Sri Rahayu.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Sri Wungu.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Banyu Urip.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Siliwangi.

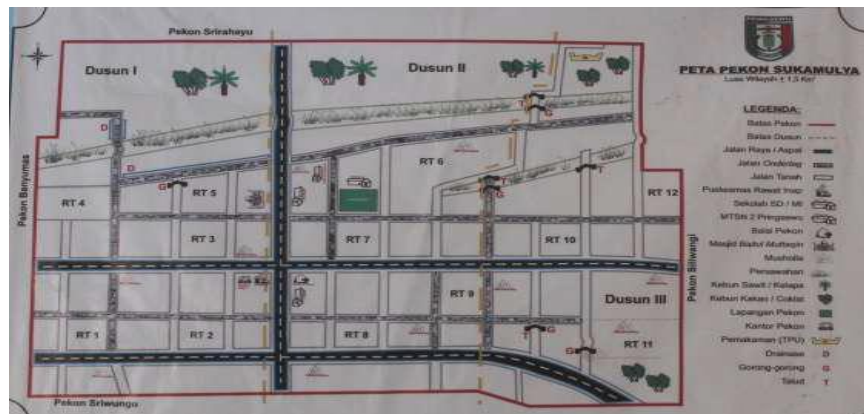
Berikut adalah peta Pekon Sukamulya sesuai dengan data monografi Pekon Sukamulya.<sup>87</sup>



**Gambar 1.2**  
**Peta Pekon Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten**  
**Pringsewu**

---

<sup>87</sup> Dihimpun dari data Monografi desa Sukamulya, tahun 2015



Sumber: Monografi Pekon Sukamulya, (Tahun 2015)

Berikut peta Pekon Sukamulya berdasarkan peta level kecamatan yang diperoleh melalui google maps.

**Gambar 1.3**

**Peta Pekon Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Berdasarkan Google Maps.**



Gambar 1.3 Peta Pekon Sukamulya

Sumber: <https://www.google.co.id/maps/place/Sukamulya,+Banyumas,+Pringsewu,+Lampung/@5.2872328,104.90907,14z/data=!4m2!3m1!1s0x2e4736b0ce85530f:0xf564f31f53001267?hl=id>

Industri kerajinan kain perca di Pekon Sukamulya secara administratif berdekatan dengan pekan lain dan cukup dekat dengan ibukota kabupaten. Pekon Sukamulya memiliki sarana dan prasarana yang cukup baik dalam bidang transportasi. Sarana transportasi yang dimiliki oleh Pekon Sukamulya yaitu terdapat angkutan perpekonan, truck umum dan ojek. Prasarana transportasi yang dimiliki yaitu

kondisi jalan beraspal dan kondisinya masih cukup baik. Pekon Sukamulya juga sebagai daerah penghubung dari pekonpekon lain yang berada di Kecamatan Banyumas atau berada pada daerah strategis yang menjadi akses jalur transportasi untuk daerah lain.

### c. Luas Wilayah

Pekon Sukamulya terletak di daerah dataran rendah. Luas wilayah Pekon Sukamulya  $\pm$  300 Ha. Adapun perincian penggunaan lahan adalah untuk 34 pemukiman, pertanian, perkebunan, perikanan dan fasilitas umum. berikut ini tabel penggunaan lahan di Pekon Sukamulya.

**Tabel 1.2**  
**Luas Penggunaan Lahan di Pekon Sukamulya Kecamatan Banyumas**  
**Kabupaten Pringsewu Tahun 2015**

No	Penggunaan Lahan	Luas lahan (Ha)	Persentase (%)
1.	Pemukiman	103 34	28
2.	Pertanian		
	1. Jagung	5	
	2. Padi sawah	15	
	3. Ubi kayu	6	
	4. Cabe	1	
	Total	27	8.98
3.	Perkebunan		
	1. Kelapa	19	
	2. Kelapa sawit	16	
	3. Coklat	112	
	4. Lada	0.5	
	5. Karet	8	
	6. Pala	1	
			52.08



	Total	156.5	
4.	Perikanan (empang/kolam)	0.25	0.50
	1. Ikan mas	0.25	
	2. Ikan nila	0.5	
	3. Ikan lele	0.5	
	4. Ikan gurame	1.5	
	Total		
5.	Fasilitas umum		4.16
	1. Makam	1	
	2. Lapangan olah raga	1	
	3. Perkantoran pemerintah	0.5	
	4. Jalan	10	
	Total	12,5	
	Jumlah	300,5	100

Sumber: Monografi Pekon Sukamulya, 2015

Berdasarkan data tabel 1.2 menunjukkan bahwa penggunaan lahan perkebunan dan pertanian masih cukup tinggi yaitu mencapai lebih dari setengah luas wilayah Pekon Sukamulya (61.01%) dengan luas lahan mencapai 156.5 Ha. Penggunaan lahan sebagai pemukiman mencapai sepertinganya yaitu 34,28% 35 dari luas wilayah Pekon Sukamulya. menunjukkan bahwa Pekon Sukamulya masih memiliki potensi sumber daya alam yang cukup tinggi.

## 6. Keadaan Penduduk Pekon Sukamulya

Keadaan penduduk yang diuraikan dalam penelitian ini adalah semua yang terkait dengan keadaan penduduk yang ada di Pekon Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

### 1. JumlahPenduduk

Berdasarkan data monografi Pekon Sukamulya jumlah penduduk Pekon Sukamulya adalah 2.421 jiwa. Data distribusi penduduk dibagi menjadi dua, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan jumlah penduduk berdasarkan umur. Berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel 1.3

**Tabel 1.3**

**Distribusi Jumlah Penduduk Pekon Sukamulya  
Berdasarkan Jenis Kelamin**

JumlahPenduduk	Jiwa
Jumlah Total	2.421 orang
JumlahLaki-laki	1.215 orang
JumlahPerempuan	1.206 orang
JumlahKepalaKeluarga	615 KK

Sumber: Monografi Pekon Sukamulya, 2015

Berdasarkan data dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk lakilaki di Pekon Sukamulya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Pekon Sukamulya memiliki sumber daya laki-laki yang cukup tinggi dibandingkan perempuan. Dari data tersebut juga dapat diperoleh Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) 100,75 yang berarti bahwa di Pekon Sukamulya pada tahun 2015 setiap ada 100 perempuan terdapat

100-101 laki-laki. Data monografi jumlah penduduk Pekon Sukamulya berdasarkan umur dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel. 1.4**

**Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur**

No	Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1	0-4	183	7,56
2	5-9	190	7,85
3	10-14	214	8,84
4	15-19	220	9,09
5	20-24	174	7,19
6	25-29	202	8,34
7	30-34	170	7,02
8	35-39	184	7,60
9	40-44	160	6,61
10	45-49	167	6,90
11	50-54	164	6,77
12	55-59	191	7,89
13	>59	202	8,34
	Jumlah	2.421	100

*Sumber: Monografi Pekon Sukamulya, 2015*

Berdasarkan data dari tabel 1.4 di atas penduduk berumur kurang dari 15 tahun cukup besar yaitu hampir seperempatnya penduduk Pekon Sukamulya (24,25%). Ini perlu menjadi perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru yang memerlukan skill dan kualitas SDM yang memadai. Jumlah usia produktif di Pekon Sukamulya yaitu pada kelompok umur antara 15-59 tahun dengan komposisi terbesar yaitu 67,41%. Dari data tersebut, meskipun memiliki usia non produktif 32,59% Pekon Sukamulya masih dalam keadaan yang menguntungkan karena memiliki usia produktif

67,41%. Jadi, angka dependency ratio di Pekon Sukamulya pada tahun 2015 adalah 48,34 atau 48 orang penduduk usia nonproduktif bergantung pada 100 orang penduduk usia produktif.<sup>88</sup>

## **B. Program Pemerintah Daerah dan Implementasi Pemberdayaan UKM Kain Perca di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu**

Secara umum usaha kecil memiliki karakteristik sebagai usaha yang tergolong lemah baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, teknologi yang digunakan, permodalan, pemasaran, promosi dan juga kerjasama masih rendah. Oleh karena itu usaha ini perlu diberdayakan untuk mampu bersaing dan mandiri.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian pada bab XI pasal 37 mengenai peranan pemerintah, pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengawasan perlindungan dan fasilitas terhadap koperasi serta memampukannya untuk melaksanakan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya guna melaksanakan kewajiban tersebut, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Koperasi untuk mengatur diri sendiri, pemerintah dengan peraturan pemerintah menetapkan

---

<sup>88</sup> Dihimpun dari data distribusi penduduk di desa Sukamulya, tahun 2015

kebijakan, mengatur pembinaan, bimbingan, pemberian fasilitas, perlindungan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Koperasi.<sup>89</sup>

Pemberdayaan usaha kecil yang utama adalah bagaimana membangun SDM yang tangguh, yaitu dengan cara mendorong kemampuan berfikir dan berperilaku inovatif serta diperlukannya keterampilan dan kemampuan dalam aspek managerial, pengelolaan keuangan, pemasaran dan kerja sama yang saling menguntungkan. Untuk itu diperlukannya kegiatan pelatihan dan pendampingan secara berkesinambungan. Pemberdayaan usaha kecil diarahkan agar menjadikan pelaku usaha mampu meningkatkan wawasan dan kemampuannya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada lima 5 program strategi pemberdayaan yang terdiri dari; Pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat, pengembangan usaha ,penyediaan informasi tepat-guna.

---

<sup>89</sup> Undang-Undang No 25 Tahun 1995, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 113

Program-program yang dilakukan Dinas Koperindag dalam pemberdayaan UKM kain perca di desa Sukamulya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian Kabupaten Pringsewu telah mengupayakan pemberdayaan dalam mengembangkan daya manusia kepada pengusaha kecil khususnya pengusaha kain perca di desa Sukamulya Kecamatan Banyumas melalui bimbingan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan untuk pengusaha kecil secara (*sustainable*).

Penyuluhan atau pelatihan yang dilakukan Dinas Koperindag di desa Sukamulya tersebut dilaksanakan satu tahun sekali. Tata cara penyuluhan dan pemberian pelatihan itu dengan mendatangkan narasumber yang terkait dengan UKM yang akan memberikan materi-materi tentang UKM, mulai dari menumbuhkan usaha serta mempertahankan hingga mengembangkan usaha tersebut seperti apa. Sedangkan upaya pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan pemikiran masyarakat sehingga dapat berinovasi lagi dengan produk-produk tersebut, agar produk-produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan usaha-usaha serupa yang lainnya.

2. Bantuan Alat Penunjang Produksi

Dinas Perindustrian kabupaten Pringsewu dalam upaya pemberdayaan terhadap para pengusaha kain perca di desa

Sukamulya telah memberikan bantuan sebagai pendukung melalui aparat desa setempat. Pemerintah telah memberikan alat untuk proses penunjang produksi yaitu pemberian mesin jahit manual maupun elektrik. Bantuan tersebut dapat membantu para pengusaha agar lebih bagus dan cepat dalam memproduksi kain perca dengan hasil dari teknologi tersebut produk-produk mereka mulai bersaing di pasaran regional maupun nasional.<sup>90</sup>

Mekanisme pemberian bantuan di desa Sukamulya adalah dengan membuat proposal yang ditujukan kepada pemerintah pusat, setelah proposal itu diterima maka baru turunkan bantuan-bantuan itu. Bantuan tersebut lalu diserahkan kepada aparat desa dan dibagikan kepada penjahit kain perca. Namun masalahnya adalah pemilik dari industri kain perca ini didominasi oleh kerabat atau keluarga, oleh karenanya bantuan tersebut tidaklah adil bagi penjahit yang lainnya.

### 3. Kemudahan Dalam Pengurusan Perizinan

Kabupaten Pringsewu sendiri khususnya pada dinas perindustrian guna membantu para pengusaha kain perca, dinas sudah menyiapkan serta menerapkan langkah strategis untuk memberikan kemudahan bagi para pengusaha kain perca untuk mendirikan usahanya agar memiliki kekuatan hukum, selain itu diharapkan dengan kemudahan tersebut akan mampu menarik minat masyarakat yang lainnya untuk semakin menambah jumlah usaha kain perca. Kemudahan pemberian

---

<sup>90</sup>Dokumentasi peneliti (*wawancara*) dengan kepala bidang Perindustrian, 20 April 2017

usaha tersebut diwujudkan dalam bentuk menyederhanakan tata cara mekanisme pengurusan surat-surat serta persyaratan administratif yang terlalu surat, dengan memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan mendirikan usaha kain perca. Hal ini dimaksudkan agar dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menjadikan desa Sukamulya sebagai sentra usaha kain terbesar di Lampung.

#### 4. Promosi dan Pemasaran.

Upaya yang dilakukan dinas Perindustrian Kabupaten Pringsewu untuk pengembangan UKM adalah yang pertama melalui pelatihan berkenaan dengan managerial pemasaran dalam pelatihan tersebut pengusaha diberikan pengetahuan bagaimana cara menjaring pasar yang potensial, kemudian yang kedua dengan mengikuti pameran-pameran sehingga dengan adanya promosi melalui kegiatan pameran mampu membuka akses terhadap pasar yang lebih luas yang nantinya produk perca dapat dikenal dikalangan luas.

Dari adanya kegiatan promosi yang dilakukan Dinas Koperindag, tidak semuanya menerima adanya kegiatan promosi tersebut, misalnya saja saat mengikuti pameran-pameran yang diadakan pemerintah setempat guna mempromosikan potensi desa-desa. Ada faktor keuntungan dan kerugian yang dirasakan oleh pemilik usaha saat adanya kegiatan pameran;



a. Keuntungannya :

- Para pemilik usaha merasa terbantu oleh adanya pameran tersebut , karena dengan mengikuti pameran tersebut produk mereka dapat dikenal oleh masyarakat luas.

b. Kerugiannya :

- Kerugiannya adalah Ketika mengikuti pameran yang diadakan pemerintah setempat, maka otomatis akan langsung mengambil barang atau produk-produk yang akan di pameran tersebut langsung dari (*outlet*) atau rumah pemilik produk tersebut. Masalahnya adalah, ketika produk tersebut diambil dan dipakai pameran dan ketika acara pameran itu selesai prroduk tersebut tidaklah dikembalikan atau dikembalikan semuanya. Hal ini menyebabkan kerugian pada pemilik produk, karena barang tidak dikembelikan dan tidak di berikan uang sebagai gantinya.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup>Dokumentasi peneliti (*wawancara*) dengan pemilik UKM kain perca di desa Sukamulya, 19 April 2017



## **BAB IV**

### **ANALISA DATA**

#### **A. Peranan Pemerintah Daerah terhadap Pemberdayaan UKM di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu**

Salah satu program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah mengutamakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk mendorong dan menumbuhkembangkan kekuatan ekonomi lokal serta mengarah pada UKM yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, kegiatan UKM merupakan salah satu faktor pendorong utama dalam pembangunan ekonomi. Sektor UKM ini adalah salah satu alternatif terbaik dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan pemberdayaan UKM oleh Pemerintah Daerah di 13 UKM kain perca adalah dengan melakukan beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

##### **1. Peningkatan Kesadaran Dan Pelatihan Kemampuan**

Pemerintah Daerah kabupaten Pringsewu berkoordinasi dengan kelurahan desa Sukamulya kecamatan Banyumas untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan UKM kain perca. Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu mengadakan kegiatan pembinaan atau pemberdayaan kepada pemilik usaha maupun pekerja selama 1 sampai 2 kali dalam 1 tahun.

Menurut hasil wawancara penulis dengan ibu Titin, pihak Dinas Koperindag menunjuk satu orang dalam kelompok usaha tersebut untuk dijadikan sebagai fasilitator kelompok usaha. Fasilitator kelompok usaha bertugas untuk mencari anggota kelompok untuk direkomendasikan untuk mengikuti program-program seperti pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh Dinas Koperindag yang bertujuan untuk lebih berinovasi lagi dalam kegiatan produksi kain perca, sehingga agar dapat lebih maksimal dan dapat bersaing dengan daerah lainnya.<sup>92</sup>

Menurut Bapak Imron, pelaksanaan pembinaan itu sempat ada sekita dua kali sudah dua tahun yang lalu. Pembinaan itu juga tidak membina terutama dikain percanya, melainkan memberikan pengenalan produk lain, karena kain perca mayoritas memang sudah lama tahu. Berbeda dengan pembinaannya, hanya memberikan penambahan produktifitas atau berinovasi.<sup>93</sup>

Menurut ibu Sulistya kabag Perindstrian, Dinas Koperindag kabupaten Pringsewu memberikan pelatihan kewirausahaan dilakukan satu tahun 3 kali dengan cara mengundang narasumber dari luar kota seperti pengusaha dari Jakarta, selanjutnya pelatihan tersebut dilaksanakan di balai desa Sukamulya yang di ikuti oleh 20 orang ketua kelompok maupun anggota kelompok. Isi dari sosialisasi yang diadakan

---

<sup>92</sup> Dokumentasi peneliti (*wawancara*) dengan Ibu Titin, pemilik UKM kain perca di desa Sukamulya, 13 Juni 2017

<sup>93</sup> Dokumentasi peneliti (*wawancara*) dengan Bapak Imron, pemilik UKM kain perca di desa Sukamulya, 13 Juni 2017

tersebut adalah memberikan pemahaman atau pengetahuan seperti cara mengolah bahan , pengelolaan baik itu dari segi pemasarannya maupun dalam mempromosikannya. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan , pemerintah berharap UKM kain perca ini dapat menembus pasar Internasional dan dapat membanggakan daerahnya.<sup>94</sup>

Menurut ibu Sofia yang merupakan salah satu pekerja (penjahit), beliau mengatakan bahwa pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperindag sudah lama sekali, kira-kira 2 tahun yang lalu. Dan saya pun selama menjadi penjahit kain perca ini hanya satu kali mengikuti pelatihan yang diadakan dibalai desa Sukamulya. Karena untuk mengikuti pelatihan atau sosialisasi itu anggotanya dipilih dan dibatasi hanya 20 orang. Jadi penjahit seperti saya ini tidak dipilih karena usia saya sudah skitar 50 tahunan. Jadi yang dipilih hanya mereka yang berusia muda.<sup>95</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Ropiah yang merupakan tenaga kerja (penjahit) dari bapak Suherman, beliau mengatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu ada dan saya pada tahun 2015 saya mendapatkan 1 mesin jahit. Dan mesin jahit yang diberikan adalah mesin jahit yang kecil atau yang manual.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Dokumentasi peneliti (*wawancara*) dengan Ibu Sulistya, Kepala Bagian Perindustrian Kabupaten Pringsewu 19 Juni 2017

<sup>95</sup> Dokumentasi peneliti (*wawancara*) dengan Ibu Sofia, Penjahit (tenaga kerja) kain perca di desa Sukamulya, 13 Juni 2017

<sup>96</sup> Dokumentasi peneliti (*wawancara*) dengan Ibu Ropiah, penjahit (tenaga kerja) kain perca di desa Sukamulya, 13 April 2017

Menurut penulis, pelatihan kemampuan yang diadakan oleh Dinas Koperidag sudah cukup bagus, karena dengan memberikan pengetahuan yang lebih banyak maka akan dapat membantu pemilik usaha dan pekerja dalam mengelola usahanya tersebut. Namun, pada kenyataannya menurut hasil wawancara peneliti dengan 13 ketua KUBE dan anggota lainnya, kebanyakan dari mereka tidak mengikuti sosialisasi tersebut karena kurangnya informasi. Serta dengan adanya sistem dipilih untuk mengikuti pelatihan ataupun sosialisasi tersebut, menimbulkan rasa ketidakadilan diantara anggota kelompok usaha.

## 2. Pemberian Bantuan

Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu dalam upaya mendukung kegiatan ekonomi di desa Sukamulya khususnya UKM kain perca dengan memberikan bantuan-bantuan seperti alat-alat produksi yaitu mesin jahit, benang dan jarum. Pemberian bantuan diadakan setiap satu tahun sekali, namun harus dengan melalui beberapa syarat, yaitu harus ada 10 anggota UKM kain perca dan selanjutnya membuat proposal yang diajukan kepada dinas Koperindag.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Nurul, yang merupakan sekretaris Kabag Perindustrian, beliau mengatakan bahwa bantuan mesin jahit yang diberikan adalah dengan pengajuan proposal oleh kelompok usaha kain perca kepada Dinas Koperindag dan selanjutnya

diproses oleh Dinas Koperindag di ajukan kepada kementrian, butuh waktu 1-2 bulan untuk mencairkan bantuan tersebut.<sup>97</sup>

Berikut adalah tabel 1.5 bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat desa Sukamulya khususnya mereka yang memiliki usaha kain perca dan pekerja (penjahit) kain perca :

**Tabel 1.5**

**Jumlah Bantuan dari Pemerintah Tahun 2015**

NO	INSTANSI PEMBERI BANTUAN MESIN	UNIT
1	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13
2	Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu	8

*Sumber : Data Dokumentasi Pebeliti ( Data Dinas Koperindag tahun 2015)*

Menurut hasil wawancara dengan Kabag Perindustrian kabupaten Pringsewu Ibu Sulistya, beliau mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan bentuk *suport* atau dukungan dari pemerintah, agar UKM kain perca di desa Sukamulya ini dapat lebih maju dan semakin sejahtera baik dari pemilik usaha maupun anggota.<sup>98</sup>

Menurut dari hasil wawancara dengan bapak Ulung, setiap kelompok usaha tidak semuanya mendapatkan bantuan, banyak dari kami ( tenaga kerja) yang kurang mampu namun tidak mendapatkan

---

<sup>97</sup> Dokumentasi peneliti (*wawancara*) dengan Ibu Nurul, sekertaris kabag Perindustrian Kabupaten Pringsewu 19 Juni 2017

<sup>98</sup> Dokumentasi peneliti (*wawancara*) dengan Ibu Sulistya, Kabag Perindustrian Kabupaten Pringsewu, 19 Juni 2017

bantuan mesin jahit. Karena bantuan yang diberikan pemerintah hanya sedikit, tidak sebanding dengan banyaknya penjahit kain perca.<sup>99</sup>

Menurut hasil wawancara peneliti dengan bapak Dirin, bapak Dirin adalah salah satu pemilik ukm kain perca, beliau berpendapat bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah hanyalah mesin jahit saja, dan mesin jahit tersebut jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah pengrajin kain perca. Sehingga pembagian mesin jahit tersebut tidak merata.<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, peneliti menemukan adanya ketidakadilan dalam pembagian bantuan di desa Sukamulya tersebut, karena dinas koperindag hanya sebatas memberikan kepada aparat tidak sampai dipembagian kepada anggota-anggota kelompok usaha tersebut (penjahit). Dan banyak dari mereka yang tidak tahu tentang adanya bantuan tersebut, atau dengan kata lain kurangnya informasi yang didapatkan karena kurangnya sosialisasi aparatur desa setempat. Sehingga yang mendapatkan bantuan hanyalah orang-orang terdekat.

### 3. Promosi dan Pemasaran

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabag Perindustrian Pringsewu, bahwa Promosi yang dilakukan sejak tahun 2007 oleh Dinas Koperindag dilakukan setiap 3 kali dalam 1 tahun. Setiap ada acara pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah

---

<sup>99</sup> Dokumentasi peneliti (*wawancara*), dengan Bapak Ulung, , pemilik UKM kain perca, 19 Juni 2017

<sup>100</sup> Dokumentasi peneliti (*wawancara*), dengan Bapak Dirin, pemilik UKM kain perca, 19 Juni 2017

setempat seperti ulang tahun kabupaten Pringsewu, pentas seni yang diadakan pemerintah selama 1 tahun sekali dan masih banyak lagi acara-acara lainnya.<sup>101</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Titin dan Ibu Sita, bahwa promosi yang dilakukan sudah cukup baik akan tetapi masyarakat itu sendiri merasa bahwa promosi yang dilakukan oleh koperindag justru mereka merasa tidak ada pengaruhnya terhadap penjualan dan mereka merasa dirugikan, karena yang pertama adalah usaha kain perca ini sudah diketahui oleh masyarakat luas baik masyarakat dalam kota maupun luar kota (Provinsi) jadi dalam usaha kain perca ini ada taupun tidak adanya sentuhan dari pemerintah maka tidak akan berpengaruh pada penjualan karena pengelola usaha ini sudah tau seluk beluknya diusaha kain perca ini. Serta disaat pemerintah mengadakan pameran maka pemerintah mengambil sampel produk-produk kain perca untuk dijadikan bahan pameran. Dan masalahnya adalah pengembalian barang setelah melakukan kegiatan promosi atau pameran, barang tersebut tidak utuh lagi , misalkan dari 10 potong yang diambil sebagai sampel maka yang dikembalikan hanya 6. Jadi para pemilik kain perca merasa dirugikan oleh hal tersebut.<sup>102</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Entas Sulaiman dan Bapak Pujoko, bahwa promosi yang dilakukan selama ini rutin

---

<sup>101</sup> Dokumentasi peneliti (*wawancara*) dengan Ibu Sulistya, Kabag Perindustrian Kabupaten Pringsewu, 19 Juni 2017

<sup>102</sup> Dokumentasi peneliti (*wawancara*), dengan Ibu Titin dan Ibu Sita, pemilik usaha kain perca 13 Juni 2017



dilaksanakan oleh pemerintah, promosi ini sangat membantu kami dalam memasarkan produk-produk kain perca ini dan akan meningkatkan penjualan dipasar-pasar lokal bahwa produk kain perca ini tidak kalah bagus dengan produk luar kota.<sup>103</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Maman, bahwa saya sangat senang dengan adanya program pemerintah untuk mempromosikan produk kain perca ini, tapi menurut pendapat saya ada tau tidak adanya program promosi yang dilakukan pemerintah tidak ada pengaruhnya terhadap penjualan produk kain perca, menurut pendapat saya.<sup>104</sup>

Jadi menurut penulis, pelaksanaan kegiatan pemasaran dan promosi sudah cukup baik hanya saja ketika ingin melakukan promosi baiknya aparat Dinas Koperindag harus dengan cara membeli bukan hanya mengambil saja, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

#### 4. Pinjaman Modal

Pada dasarnya permasalahan utama yang dialami oleh UKM kain perca adalah pada aspek permodalan, bahan baku, dan pemasaran. Dan semuanya itu bersumber pada kurangnya modal dan lemahnya sumber daya manusia. Padahal jika pemerintah memberikan pinjaman modal secara tepat akan dapat membantu dalam kegiatan pengembangan UKM yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

---

<sup>103</sup> Dokumentasi peneliti (*wawancara*), dengan Bapak Entas Sulaiman dan Bapak Pujoko, pemilik usaha kain perca 19 Juni 2017

<sup>104</sup> Dokumentasi peneliti (*wawancara*), dengan Bapak Maman, pemilik usaha kain perca, 19 Juni 2017

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Sulistya, Kabag Perindustrian, bahwa bantuan permodalan yang melalui Dinas Koperindag harus melalui tahap-tahapan yang harus sesuai dengan persyaratan peminjaman modal usaha. Pengajuan syarat sehingga mendapatkan pinjaman harus melalui tahapan seperti, memiliki usaha yang produktif, memiliki domisili yang tetap, harus memiliki surat resmi pendirian usaha, dan yang masih memiliki tunggakan belum bisa diberikan tambahan modal usaha lalu diserahkan kepada Dinas Koperindag. Modal yang akan didapatkan adalah hanya sebesar Rp.20.000.000,00 dan bunga dari pinjaman tersebut adalah tetap.<sup>105</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Wahendro dan Ibu Titin, beliau merupakan pemilik usaha kain perca, menurut beliau bantuan modal yang diberikan pemerintah itu sebesar Rp. 20.000.000, sangatlah sedikit. Namun, walaupun juga meminjam ke Dinas Koperindag itu hanya sebagai tambahan modal saja, karena modal yang diperlukan untuk usaha yang saya kelola ini sangat memakan biaya. Jadi, menurut saya bantuan yang diberikan oleh Dinas Koperindag sangat cocok untuk mereka yang baru memulai usaha.<sup>106</sup>

Menurut penulis, pinjaman modal yang diberikan oleh Koperindag terhadap UKM kain perca tersebut sangatlah minim. Karena mengingat kebutuhan bahan produksi yang sangat banyak dan permintaan yang

---

<sup>105</sup> Dokumentasi peneliti (*wawancara*) dengan Ibu Sulistya, Kabag Perindustrian Kabupaten Pringsewu, 19 Juni 2017

<sup>106</sup> Dokumentasi peneliti (*wawancara*), dengan Bapak Wahendro dan Ibu Titin, pemilik usaha kain perca, 19 Juni 2017

sangat banyak pula, maka modal Rp.20.000.000 itu tidaklah cukup. Sehingga banyak pemilik usaha tidak tertarik untuk meminjam di Koperindag, kebanyakan dari mereka meminjam modal usaha di bank-bank swasta.

#### 5. Peningkatan Kesejahteraan

Peningkatan kesejahteraan suatu masyarakat dapat dilihat dari banyaknya pendapatan yang diperoleh, dari pendapatan yang didapatkan apakah ada peningkatan atau tidak, dari hal tersebut dapat diketahui didalam suatu masyarakat itu kesejahteraannya meningkat atau tidak.

Berikut adalah tabel perbandingan pendapatan sebelum dan sesudah adanya perhatian dari pemerintah dan perbandingan antara pendapatan Pemilik UKM dan Pekerja, merupakan hasil wawancara peneliti dengan pemilik UKM dan Pekerja (Penjahit) sebagai berikut:

**Tabel 1.6**

**Perbandingan Kisaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Adanya Perhatian dari Pemerintah (Dinas Koperindag) per bulan.**

NO	NAMA	PENDAPATAN SEBELUM/jt	PENDAPATAN SESUDAH/jt
1	Nova Kurohman	Rp. 100- RP.180	Rp. 100- Rp. 200
2	M. Rohim	Rp. 100- RP.150	Rp. 150- RP.200
3	Dirin	Rp. 50- RP.80	Rp. 50- RP.100

4	Maman	Rp. 50- RP.70	Rp. 50- RP.70
5	Suherman	Rp. 100- RP.180	Rp. 100- RP.200
6	Entas Sulaiman	Rp. 30- RP.50	Rp. 30- RP.50
7	Ahmad	Rp. 40- RP.70	Rp. 70- RP. 80
8	Ulung Supriadi	Rp. 50- RP.100	Rp. 100- RP.180
9	Pujoko	Rp. 70- RP.80	Rp. 100- RP.120
10	Dwi Wahendro W	Rp. 50- RP.80	Rp. 100- RP.150
11	Mutatohirin	Rp. 50- RP.80	Rp. 80- RP.100
12	Siti Ruminah	Rp. 30- RP.50	Rp. 50- RP.60
13	Sutirah	Rp. 50- RP.80	Rp. 80- RP.90

Sumber: Hasil wawancara peneliti (Dokumentasi Tahun 2017)<sup>107</sup>

Berdasarkan Tabel 1.6 diatas menunjukan bahwa pendapatan pemilik UKM ini meningkat setelah adanya perhatian dari pemerintah, seperti bentuk bantuan pengetahuan, bantuan alat produksi sampai pada promosi dan modal. Karena dengan adanya bantuan yang diberikan pemerintah akan dapat mendorong meningkatnya produksi.

**Tabel 1.7**

**Pendapatan Penjahit (Tenaga Kerja) per Bulan**

No	Ketua Kelompok	Nama Pekerja	Pendapatan (ribu)
1	Nova Kurohman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aminah</li> <li>Sofia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>250</li> <li>350</li> </ul>

<sup>107</sup>Data diperoleh dari hasil wawancara, pada 15 juni 2017

2	M.rohim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ropiah</li> <li>• Sarida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400</li> <li>• 300</li> </ul>
3	Dirin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mardia</li> <li>• Muslim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 350</li> <li>• 400</li> </ul>
4	Maman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarifah</li> <li>• Nur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250</li> <li>• 300</li> </ul>
5	Suherman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indri</li> <li>• Sopiya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400</li> <li>• 400</li> </ul>
6	Entas Sulaiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Irma</li> <li>• Nisa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 350</li> <li>• 250</li> </ul>
7	Ahmad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ernawati</li> <li>• Sulis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400</li> <li>• 300</li> </ul>
8	Ulung Supriadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanum</li> <li>• Yani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400</li> <li>• 300</li> </ul>
9	Pujoko	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rini</li> <li>• Susi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300</li> <li>• 200</li> </ul>
10	Dwi Wahendro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewi</li> <li>• Sulastri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 450</li> <li>• 500</li> </ul>
11	Mutatohirin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Endang</li> <li>• Indah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 350</li> <li>• 260</li> </ul>
12	Siti Ruminah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indrianti</li> <li>• Sulistyo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500</li> <li>• 650</li> </ul>
13	Sutirah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tatang</li> <li>• Supriadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500</li> <li>• 600</li> </ul>

Sumber: hasil wawancara peneliti ( Dokumentasi 2017)

Berdasarkan tabel 1.6 dan tabel 1.7 dapat dilihat bahwa perbandingan pendapatan antara pemilik UKM dan pekerja sangatlah jauh berbeda, dan dapat kita lihat yang sejahtera adalah pemilik UKM dan bukan pekerja (penjahit), karena mereka diberi upah sesuai dengan per potong produk kain perca. Upah dari menjahit satu lembar seprai hanya Rp.8000 ribu rupiah, untuk satu lembar sarung bantal diupah Rp.1000, dan keset Rp.5000-Rp.6000 rupiah. Tidak memakai sistem gaji, dan masih memakai sistem upah jahit perpotong. Jadi hanya mengukur tenaga atau kemampuan itulah yang didapatkan tidak sebanding dengan pendapatan

ketua kelompok. Dan ketika ada pelatihan dan bantuan datang pekerja ini pun sangat banyak yang tidak tahu atau mendapatkan bantuan tersebut.

## **B. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UKM Perspektif Ekonomi Islam.**

Program-program yang dilakukan oleh Dinas Koperindag adalah sebuah bentuk dukungan atau *suport* kepada pelaku usaha di desa Sukamulya tersebut, agar masyarakat atau pelaku usaha ini lebih memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menciptakan produk-produk yang unggul sehingga dapat bersaing di regional dan nasional.

### **1. Tauhid**

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Allah adalah pemilik hakiki, manusia hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu sebagai ujian bagi mereka. Karena kepada Allah SWT kita akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Ali-Imran ayat 9, bahwa orang-orang yang mendalam pemahamannya dan berfikir tajam, yaitu orang yang berakal, orang-orang yang mau menggunakan pemikirannya, mengambil faedah, hidayah dan menggambarkan keagungan Allah SWT. Ia mengingat Allah SWT dengan ucapan dan hati dalam semua situasi dan kondisi.

Selain itu, ayat diatas menunjukkan bahwa orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun yang akan melakukan kegiatan perekonomian haruslah bersikap adil, bermoral pada sikap

usahanya dan hanya orang-orang yang seperti itulah yang akan terhindar dari siksa api neraka. Meraka (pelaku ekonomi) berusaha mendasarkan konsep-konsep Islam tentang kebahagiaan ,manusia dan kehidupan yang baik sangat menekankan aspek persaudaraan,keadilan dan pemenuhan kebutuhan baik secara materil maupun spiritual.

## 2. Keadilan Distribusi

Dari berbagai program pemerintah yang telah dilakukan, salah satunya adalah memberikan bantuan yaitu bantuan alat produksi seperti mesin jahit, gunting, benang dan jarum. Bantuan tersebut tentu sangat berguna bagi penjahit kain perca. Namun, melihat banyak nya pekerja (penjahit) dan melihat jumlah bantuan yang di keluarkan pemerintah tidaklah sebanding.

**Tabel 1.8**

**Jumlah Bantuan dari Pemerintah Tahun 2015**

NO	INSTANSI PEMBERI BANTUAN MESIN	UNIT
1	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13
2	Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu	8

*Sumber : Data Dokumentasi Pebeliti ( Data Dinas Koperindag tahun 2015)*

Dibandingkan dengan :

**Tabel 1.9**

**Jumlah Pemilik Usaha dan Pekerja (Penjahit) tahun 2015**

Nama Pemilik Perusahaan	Produk yang Dihasilkan	Jumlah Produksi		Tenag a Kerja
		Jumlah	Satuan	
Nova Kurohman	Kain Perca	20.000	Buah	200
M. Rohim	Kain Perca	10.000	Buah	115
Dirin	Kain Perca	7.000	Buah	52
Maman	Kain Perca	5.000	Buah	70

Suherman	Kain Perca	14.000	Buah	200
Entas Sulaiman	Kain Perca	2.000	Buah	70
Ahmad	Kain Perca	2.000	Buah	24
Ulung Supriadi	Kain Perca	1.500	Buah	32
Pujoko	Kain Perca	6.500	Buah	56
Dwi Wahrenro W	Kain Perca	4.000	Buah	60
Mutatohirin	Kain Perca	6.000	Buah	50
Siti Ruminah	Kain Perca	3.000	Buah	40
Sutirah	Kain Perca	4.000	Buah	40

*Sumber: Data Dokumentasi Pebeliti ( Data Dinas Koperindag tahun 2015)*

Sesuai dengan data tabel 1.8 dan 1.9 dapat dilihat bahwa adanya ketidakmerataan distribusi bantuan yang di keluarkan oleh pemerintah setempat. Perbandingan yang jauh inilah yang meninggalkan rasa ketidakadilan dihati masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan , sedangkan kondisi ekonomi dan pekerjaan mereka sama. Jika dilihat dari pandangan Islam, kondisi tersebut tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi islam yang salah satunya adalah keadilan, yang artinya adalah yang bersal dari kata '*Adl* (adil) yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukannya sesuai dengan posisinya.

Berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 tentang keadilan dapat disimpulkan bahwa adanya ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam pembagian bantuan dan kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah (DinasKoperindag) mengenai hal tersebut. Terlepas dari ada unsur ketidakadilan dan ketidakmerataan yang dirasakan sebagian masyarakat, jika melihat dari program Dinas Koperindag. Kedua adalah promosi dan pemasarannya tidak ada unsur tanggung jawabnya terhadap produk-produk yang telah digunakan. Masalahnya ketika selesainya acara



pameran jarang produk yang dibalikan utuh, apakah itu hilang atau diambil oleh petugas yang mengikuti pameran. Tidak adanya uang pengganti dan itu mengakibatkan kerugian secara materil bagi pemilik produk.

Menurut penulis, peran Dinas Koperindag dalam pemberian bantuan belum maksimal, karena pada fakta diatas menggambarkan bahwa kesejateran hanya dirasakan oleh orang-orang yang mendapatkan bantuan saja, dan menurut penulis Dinas Koperindag kurang memberikan pengawasan disaat pemberian bantuan, sehingga bantuan tidak tepat sasaran.

### 3. Kemandirian

Program-program seperti pelatihan kewirausahaan bagi UKM yang merupakan program untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang ada pada usaha mikro, kecil dan menengah untuk dapat menjalankan usahanya secara mandiri.

Berdasarkan QS. Al-Qhashas ayat 7 terdapat makna yang sangat jelas bahwa merupakan suatu kewajiban seorang muslim dan manusia untuk selalu berusaha sekuat tenaga dan pikiran dalam batas yang dibenarkan Allah untuk memperoleh harta dan mencari dengan bersungguh-sungguh dengan apa yang telah dianugerahkan Allah dengan kemampuan yang dimiliki untuk mencari serta memanfaatkan sumber daya yang ada karena Allah tidak akan mengubah keadaan umatnya sebalum mereka mengubahnya sendiri.

#### 4. Kebersamaan

Program-program yang dijalankan pemerintah dapat menumbuhkembangkan sikap percaya diri terhadap kemampuan yang ada pada dirinya karena dengan adanya program-program tersebut dapat meningkatkan kinerja dalam mengembangkan kemampuan atau keahlian dan usaha yang dijalani. Dengan keterlibatan semua pihak seperti aparat kelurahan, Dinas Koperindag, Pelaku UKM, diharapkan program pemberdayaan UKM dapat terlaksana dengan tepat sasaran sehingga seluruh potensi dan sumber-sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara bersama-sama dan pada akhirnya pelaku UKM dapat dijalankan usahanya secara mandiri.

Sikap kebersamaan dan partisipasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu kebersamaan yang merupakan lawan dari konsep kapitalis dan sosialis. Konsep kebersamaan dapat tercermin dari partisipasi setiap pelaku pemberdayaan dan kebersamaan para pelaku UKM dalam mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperindag dan ingin bersama-sama dalam meningkatkan taraf hidup.

Jadi, menurut penulis Peranan Dinas Koperindag dalam memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui program-program yang sudah dilaksanakan belum maksimal karena masih banyak pemilik UKM dan pengrajin yang belum sejahtera, adanya kesenjangan perekonomian antara pemilik usaha dan pekerja, dan antara penerima bantuan dan yang tidak menerima bantuan. Dan masih

banyak program-program dalam pemberdayaan UKM yang harus diperbaharui sistem dan pelaksanaannya, sehingga dapat membantu pemilik UKM untuk mengembangkan kreatifitas dan produktifitasnya dalam berwirausaha secara mandiri.

#### 5. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan ini misalnya, terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara kepentingan didunia dan akhirat, keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, dan kepentingan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah hendaknya memberikan pelayanan yang akurat dalam memenuhi kewajiban dan hak-hak masyarakat khususnya pada masalah pendistribusian bantuan. Pendistribusian bantuan hendaknya dilakukan oleh pihak pemerintah sehingga dapat terpantau dengan baik , dan terciptanya keadilan distribusi yang mengedepankan asas keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh penulis,

1. Peranan Pemerintah Daerah terhadap pemberdayaan UKM kain perca di desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu, ada empat yaitu:

- a. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan
- b. Pemberian Bantuan
- c. Promosi dan Pemasaran
- d. Pinjaman Modal

Peranan pemerintah daerah (Dinas Koperindag) dalam memberdayakan UKM kain perca ini sesuai dengan strategi pemberdayaan yaitu motivasi, peningkatan kesadaran, manajemen diri, mobilisasi sumber daya, pengembangan jaringan. Namun berdasarkan penelitian masih kurangnya pengawasan (pertanggungjawaban) dari pemerintah sehingga memunculkan permasalahan yang baru.

2. Tinjauan Ekonomi Islam tentang pemberdayaan UKM kain perca di desa Sukamulya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu, Tauhid, Kebersamaan, Keadilan, Produktifitas dan kepemilikan.

Dengan adanya kesesuaian terhadap prinsip pemberdayaan ekonomi Islam maka akan menghasilkan yang sesuai dengan syariat Islam. Tetapi masih banyak ketidakadilan dalam pendistribusian bantuan yang berasal dari Dinas Koperindag.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat diajukan adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Pringsewu :
  - a. Dinas Koperindag seharusnya memiliki data base (pemberian bantuan).
  - b. Dinas Koperindag harus memberikan informasi yang akurat kesemua masyarakat.
  - c. Dinas Koperindag harus memperketat pengawasan dalam menjalankan program (pemberian bantuan, dll).
2. Bagi peneliti selanjutnya, hendaklah untuk memperluas penelitian sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang pemberdayaan UKM kain perca di desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ady Imam Taufiq, *Cara Mudah Melakukan Usaha Kecil*, Siklus Hanggar Kreator, Yogyakarta, 2009
- Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010
- Alief Rakhman Setyanto, Bhimo Rizky Samodra, Yogo Pasca Pratama, *Jurnal Etikonomi*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2015
- Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Lautan Lestari, 2009
- Arikunto, S., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006
- Chaidir Nasution, "Sekilas Tentang Ekonomi Islam dan Konvensional". *IPI Jurnal Asas*, 2013
- Ertika Urie , *Perspektif Bisnis Syari'ah Pengembangan Usaha Keci Perseorangan Informal Tradisional Di Bandar Lampung*, Tesis UIN Lampung, Bandar Lampung, 2010
- Hadist Shahih Riwayat Bukhory Muslim*, Semarang. Pustaka As-Sunnah.hadist
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Ekonosia Fakultas Ekonomi UII, 2004
- Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung, Humaniora Pratama, 2001
- Hussein Bahreisj, *Hadist Shahih Bukhari-Muslim*, CV. Karya Utama, Surabaya, 2001
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta, Kalam Mulai, 2009
- Jurnal Ilmiah Berkala Empat Bulanan. ISSN 1411 - 9366 Volume 5 No.1 Mei 2017
- Kesi Widjajanti, Model Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Semarang , Juni 2011

- M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, UII Press, 2002
- Munajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2003
- M. Syahril Yusuf, *Entrepreneurship*, Lentera Ilmu Cendikia, Jakarta, 2010
- Murasa Sukarniputra, *Sistem Ekonomi Islam* ( Makalah disampaikan pada workshop analisis keuangan syari'ah pada pusat pengkajian Ekonomi Islam (P3EI) IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 13-20 mei 2016
- Nasrullah Yusuf, *Kewirausahaan (Inovasi dan Bisnis Kecil)*, Unila, Lampung, 2007
- Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007
- Oos M. Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung, Alfabeta, 2014
- Onny S. Prijono, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta, CSIS. 2009
- Perda Nomor 13 Tahun 2009, [www.dinaskoperindag.com](http://www.dinaskoperindag.com), Akses pada 14 Maret 2017
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009
- Rumadani Sagala, *Dakah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Bandar Lampung: Fakta Press Fakultas Tarbiah, 2009
- Sagimun, *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*, Cet. 3, PT.IdayuPress, Jakarta, 2007
- Siti Mujaitun, *Peran Pemerintah Tentang Pengembangan Perekonomian dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Universitas Muhammadiyah SumatraUtara 2013
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Ilmu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 2010

- Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian: Untuk Ekonomi dan Bisnis, Rev. Ed.*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, Bandung, Alfabeta, 2016
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, 2008
- Surya Abraham, *Jurnal Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Ilmu Pemerintahan)*, Tahun 2016
- Sritua Arief, *agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka P bekerjasama dengan IDEA Institut of development And Economic Analysis, 2007
- Soeharto Prawirokusumo, *Ekonomi Rakyat Konsep, Kebijakan, dan Strategi*, Yogyakarta, BPFE 2009
- Suherman, [www.koperasiumkm.lampungprov.go.id](http://www.koperasiumkm.lampungprov.go.id), Akses pada 18 Mei 2017.
- Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000
- Undang-Undang RI, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2009
- Totok Mardikunto, Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung, Alfabeta, 2013
- Umer Chapra, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, cet VIII, 2006
- Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta, Rabbani Pers, 2001